# RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023



#### KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentunya membawa perubahan yang mendasar dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dimasa mendatang. Sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan, maka Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, sektor ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dilakukan dengan melalui pendekatan agribisnis dan ketahanan pangan. Pendekatan ini pada hakekatnya bermaksud meletakkan pertanian secara utuh dengan memperhatikan berbagai faktor penunjang. Melalui pendekatan ini diharapkan sektor pertanian dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama petani dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan berdasarkan pola dasar pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Tengah dan Rencana Strategi 2021 – Kata Pengantar – Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2023

2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Lampung Tengah, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Dinas

Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka disusunlah Rencana Kerja 2024

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lampung Tengah selama satu tahun

kedepan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Lampung Tengah ini tersusun berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima

kasih. Kiranya ini dapat bermanfaat dalam memberikan dukungan pembangunan di

Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Dinas

J<u>UMALI, SP.MIP</u>

NIP. 19650930 199403 1 006



# **DAFTAR ISI**

		Halama	ın
	KATA PENGANTAR	i	
	DAFTAR ISI DAFTAR TABEL	111	
		v vi	
	DAFTAR LAMPIRAN	vii	
I.	PENDAHULUAN	1	
	1.1 Latar Belakang	1	
	1.2 Landasan Hukum	2	
	1.3 Maksud dan Tujuan	5	
	1.4 Sistematika Penulisan	6	
II.	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN,		
	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN LALU	7	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan,		
	Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan		
	Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman		
	Pangan dan Hortikultura	7	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan		
	Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi		
	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan		
	Hortikultura	16	
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21	
III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23	
	3.1 Telaahan terhadap KebijakanNasional	23	
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan		
	Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	26	
	3.3 Program dan Kegiatan	27	



IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	28
V.	PENUTUP	33
	5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	34
	5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	34
	5.3 Rencana Tindaklanjut	35

# **LAMPIRAN**



# DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.	Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas,
	dan Produksi Tahun 2021 – 2022
2.	Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tanaman
	Hortikultura Unggulan Tahun 2021-2022
3.	Jumlah Lembaga Tani Tahun 2021 – 2022
4.	Perkembangan peningkatan kemampuan kelompok tani Tahun 2021 – 2022. 11
5.	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2021–2022
6.	Situasi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 13
7.	Komposisi Pola Pangan Harapan
8.	Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan
	dan Hortikultura Tahun 2023
9.	Indikator kinerja akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
	Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam lima
	tahun mendatang



#### DAFTAR LAMPIRAN

# Lampiran

- Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
- 2. Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah
- 3. Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah
- 4. Tabel T-C 32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah
- Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun sebagai kelanjutan dari Renja Tahun 2023. Sehubungan dengan hirarki organisasi, Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2021–2026) Kabupaten Lampung Tengah. Renja ini juga merupakan salah satu bagian terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan dari RKPD, Renstra SKPD, Renja Kementerian Pertanian RI, Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2024.

Renja disusun untuk menjamin kontinutas dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun tersebut. Renja juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renja 2024 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah merupakan dokumen yang memiliki kedudukan yang strategis dan vital sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, karena merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dan titik tolak bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2024.

#### 1.2 Landasan Hukum

Sebagai dokumen perencanaan formal instansi pemerintah, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Periode 2024 mengacu kepada:

- a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
   Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- d Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor Kep.5/M.PPN/HK/OT/2021 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022
- g Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
   perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 53
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- h Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- i Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- k Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
- m PeraturanPemerintah No. 25 Tahun 2000 tentangPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerah.
- n PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah.
- o PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006 tentangLaporanKeuangan dan KinerjaInstansiPemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan
- q Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- r Peraturan Presiden No 2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 2019.
- S Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
- t Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- u Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- v Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- w Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- x Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.
- y Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampunh Tengah.
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
   Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- aa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengarustamaan Gender
- bb Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)

- cc Keputusan Bupati No. 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
- dd Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikutura dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan selama satu tahun kedepan sebagai dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, bertujuan :

- a. Menyediakan pedoman atau acuan bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam merumuskan kebijakan, prioritas program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pusat.
- b. Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.
- c. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tamanan Pangan dan Hortikultura.
- d. Memberikan informasi tentang kondisi umum Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam konstelasi regional dan nasional.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tamanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

#### Bab II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun lalu dan capaian renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (2) analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan tentang (1) telaahan terhadap kebijakan nasional, (2) perumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, (3) program dan kegiatan.

#### Bab IV: PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

#### **BAB II**

# HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN LALU

# 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam Penyusunan Renja di tahun 2023, metodelogi yang digunakan adalah dengan mengevaluasi pelaksanaan renja di tahun sebelumnya, yaitu dengan membandingkan hasil kinerja dan capaian yang diperoleh dengan indicator kinerja yang telah disepakati di tahun tersebut. Program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maka perlu adanya evaluasi pelaksanaan renja dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat dilihat pada Tabel evaluasi terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun lalu dan capaian Renstra tertuang dalam Tabel T-C..29. Berdasarkan table T-C. 29 dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 dari aspek realisasi anggaran sudah baik yaitu mencapai 88,06%. Sedangkan jika dilihat dari aspek ketercapaian target kinerja, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki predikat sangat baik dengan nilai 99,93%. Dan jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 memiliki predikat sangat baik dengan nilai 306%. Keberhasilan ini tidak lain dikarenakan adanya kerja sama yang solid antara pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan hortikultura serta peran serta stake holder terkait.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bida	Indikator	Target	Realisasi	Target dan Realisasi Kiner	a Program	dan	Target	Perki	iraa
	ng Urusan	Kinerja	Kinerja	Target	Kegiatan Tahun 2022			Progra	n	
	Pemerintaha	Program	Capaian	Kinerja				m dan	Reali	sasi
	n Daerah	(outcome)/K	Program	Hasil				Kegiata	Capa	ian
	dan	egiatan	(Renstra	Program				n	Targe	
	Program/Ke	(output)	Perangk	dan				(Renja	Rens	
	giatan	(	at	Keluara				Perangk	Perai	
	8		Daerah)	n				at	t Dae	_
			Tahun	Kegiatan				Daerah)	s/d T	
			2024	s/d				Tahun	2023	
				tahun				2023		
				2021						
					Target Renja Perangkat	Realisasi	Tingk		Rea	Tin
					Daerah Tahun 2022	Renja	at		lisa	gka
						Perangk	Realis		si	t
						at	asi		Cap	Ca
						Daerah	(%)		aia	pai
						Tahun			n	an
						2022			Pro	Re
									gra	alis
									m	asi
									dan	Tar
									Keg	get
									iata	Re
									n	nst
									s/d	ra

									tah un 202 3	(% ) s/d Ta hu n 202 3
2 09 01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase dokumen perencanaan , penganggara n, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100,00	100	300	300 %

		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	90	85	85	85	100,00	85	255	283 %
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	2	2	100,00 %	2	7	233 %
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	2	2	100,00 %	2	4	200 %

2 09	Koordinasi	Jumlah	1	0	1	1	100,00	1	2	200
01	dan	Dokumen	1			1	%	1	-	%
2.01	Penyusunan	Perubahan					, 0			/
03	Dokumen	RKA-SKPD								]
	Perubahan	dan Laporan								
	RKA-SKPD	Hasil								
		Koordinasi								
		Penyusunan								
		Dokumen								]
		Perubahan								
		RKA-SKPD								]
2 09	Koordinasi	Jumlah	6	6	6	6	100,00	6	18	300
01	dan	Laporan					%			%
2.01	Penyusunan	Capaian								
06	Laporan	Kinerja dan								
	Capaian	Ikhtisar								
	Kinerja dan	Realisasi								]
	Ikhtisar	Kinerja								
	Realisasi	SKPD dan								]
	Kinerja	Laporan								
	SKPD	Hasil								]
		Koordinasi								]
		Penyusunan								
		Laporan								
		Capaian								
		Kinerja dan								
		Ikhtisar								
		Realisasi								

		Kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	0	0	0	0,00%	12	12	100 %
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	12	12	12	100,00	12	36	300 %
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dalam pemberian Gaji dan Tunjangan	12	12	12	12	100,00 %	12	36	300 %

		ASN								
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	3	3	100,00	3	9	300 %
2 09 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksanany a Pengelolaan danPenyiapa n Bahan TanggapanPe meriksaan	3	0	3	3	100,00 %	3	6	200 %
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	6	0	6	6	100,00 %	6	12	200 %

		Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD								
2 09	Administrasi	-	100	100	100	100	100,00	100	300	300
01	Umum	jumlah					%			%
2.06	Perangkat	penyediaan								
	Daerah	kebutuhan layanan								
		umum								
		perangkat								
		daerah								
2 09	Penyediaan	Jumlah	10	10	10	10	100,00	10	30	300
01	Komponen	ketersediaan					%			%
2.06	Instalasi	KomponenIn								
01	Listrik/Pener	stalasi								
	angan	Listrik/Pener								
	Bangunan	anganBangun								
	Kantor	an Kantor								

2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	6	8	8	100,00 %	8	22	275 %
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	16	3	3	100,00 %	3	22	733 %
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan logistik kantor	50	50	50	50	100,00 %	50	150	300 %
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	1000	1000	1000	1000	100,00 %	1000	300	300 %
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	3	0	3	3	100,00 %	0	3	100 %

		Disediakan								
2 09 01 2.06 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	12	12	100,00 %	12	36	300 %
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah pada perangkat daerah	12	12	12	12	100,00	12	36	300 %

2 09	Penyediaan	Jumlah Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	300
01	Jasa	Penyediaan					%			%
2.08	Komunikasi,	Jasa								
02	Sumber Daya	Komunikasi,								
	Air dan	Sumber Daya								
	Listrik	Air dan								
		Listrik yang								
		Disediakan								
2 09	Pemeliharaa	Jumlah	46	26	31	24	77,42	39	89	193
01	n Barang	barang milik					%			%
2.09	Milik	daerah pada								
	Daerah	perangkat								
	Penunjang	daerah yang								
	Urusan	mendapat								
	Pemerintaha	pemeliharaa								
	n Daerah	n								
2 09	Penyediaan	Jumlah	1	0	1	1	100,00	1	2	200
01	Jasa	Kendaraan					%			%
2.09	Pemeliharaan	Perorangan								
01	, Biaya	Dinas atau								
	Pemeliharaan	Kendaraan								
	dan Pajak	Dinas Jabatan								
	Kendaraan	yang								
	Perorangan	Dipelihara								
	Dinas atau	dan								
	Kendaraan	dibayarkan								
	Dinas Jabatan	Pajaknya								

2 09	Penyediaan	Jumlah	10	10	2	2	100,00	2	14	140
01	Jasa	Kendaraan					%			%
2.09	Pemeliharaan	Dinas								
02	, Biaya	Operasional								
	Pemeliharaan	atau								
	, Pajak, dan	Lapangan								
	Perizinan	yang								
	Kendaraan	Dipelihara								
	Dinas	dan								
	Operasional	dibayarkan								
	atau	Pajak dan								
	Lapangan	Perizinannya								
2 09	Pemeliharaan	Jumlah	20	15	20	20	100,00	20	55	275
01	Peralatan dan	Peralatan dan					%			%
2.09	Mesin	Mesin								
06	Lainnya	Lainnya yang								
		Dipelihara								
2 09	Pemeliharaan	Jumlah	1	1	1	1	100,00	1	3	300
01	/Rehabilitasi	Gedung					%			%
2.09	Gedung	Kantor dan								
09	Kantor dan	Bangunan								
	Bangunan	Lainnya yang								
	Lainnya	Dipelihara/Di								
		rehabilitasi								
2 09	PROGRAM	Persentase	50	40	45	45	100,00	47	132	264
02	PENGELOL	Desa Dengan					%			%
	AAN	Kemandiria								
	SUMBER	n Pangan								

	DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULA TAN DAN KEMANDI RIAN PANGAN									
		Persentase Kampung yang telah memiliki lumbung pangan masyarakat	60	34	41	41	100,00 %	50	125	208 %
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktu r dan Seluruh Pendukung Kemandiria n Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/	Jumlah infrastruktu r pergudanga n dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpana n cadangan pangan	9	1	7	7	100,00	8	16	178 %

2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang tersedia	9	1	7	7	100%	0	8	89 %
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kebutuhan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang disediakan	14	7	1	1	100,00 %	0	8	57 %
2 09 03	PROGRAM PENINGKA TAN DIVERSIFI KASI DAN KETAHAN AN PANGAN MASYARA KAT	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	80	31	50	50	100,00 %	70	151	189 %
		Persentase ketersediaan pangan	80	31	50	50	100,00 %	70	151	189 %
		Konsumsi Beras (Kg/Kapita/	106,4783	108,0919	107,554	107,554	100,00	107,016 1	322, 662	303 %

		Thn)								
		Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/ Thn)	83,61868	76,99112	79,20031	79,20031	100,00	81,4095	237, 600 93	284 %
		Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/ Thn)	52,65634	50,38019	51,13891	51,13891	100,00 %	51,8976 3	153, 416 73	291 %
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	95	85	90	90	100,00	90	265	279 %

	rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
2 09	Penyediaan	Informasi	1	1	10	10	100,00	0	11	110
03	Informasi	Harga					%			0%
2.01	Harga	Pangan dan								
01	Pangan dan	Neraca								
	Neraca Bahan	Bahan Makanan								
	Makanan	Makanan								
2 09	Penyediaan	Pangan	10	7	21	21	100,00	21	49	490
03	Pangan	Berbasis					%			%
2.01	Berbasis	Sumber Daya								
02	Sumber Daya	Lokal Yang								
	Lokal	Tersedia								
2 09	Koordinasi,	Jumlah	7	5	0	0	0,00%	0	5	71
03	Sinkronisasi	koordinasi								%
2.01	dan	pelaksanaan								
03	Pelaksanaan	distribusi								
	Distribusi	pangan								
	Pangan	pokok dan								
	Pokok dan	pangan								
	Pangan	lainnya								

	Lainnya									
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah lokasi daerah yang dipantau	15	15	15	15	100,00	15	45	300 %
2.09.0 3.2.01 .05	Pengembang an Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah peserta yang mengikuti	45	30	0	0	0,00%	0	30	67 %
2 09 03 2.01 06	Pengembang an Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangk an	5	8	8	8	100,00 %	8	24	480 %

2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbang an Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disediakan	30	20	30	22	73,33	30	72	240 %
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/K ota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten	12	7	7	7	100,00 %	0	14	117 %
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	14	14	14	14	100,00	14	42	300 %
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/K ota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	30	20	30	22	73,33 %	15	57	190 %

2 09 03 2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase penentuan harga minimum daerah pangan lokal	50	28,6	28,6	28,6	100,00	35,71	92,9	186 %
2 09 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok lokal	14	8	4	4	100,00 %	0	12	86 %
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Persentase pelaksanaan target konsumsi pangan	90	85	90	90	100,00 %	90	265	294 %

	Perkapita/T ahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	perkapita pertahun								
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	1	1	1	1	100,00 %	1	3	300 %
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Penganekara gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaa n Kelompok Masyarakat dalam Penganekara gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	2	4	4	100,00 %	4	10	250 %

2 09	Koordinasi	Jumlah	12	10	2	2	100,00	2	14	117
03	dan	koordinasi					%			%
2.04	Sinkronisasi	dan								
03	Pemantauan	sinkronisasi								
	dan Evaluasi	Pemantauan								
	Konsumsi per	dan Evaluasi								
	Kapita per	konsumsi per								
	Tahun	kapita								
		pertahun								
2 09	PROGRAM	Persentase	35,71	25	28	28	100,00	28	81	227
04	PENANGA	Penanganan					%			%
	NAN	Rawan								
	KERAWAN	Pangan								
	AN									
	PANGAN									
2 09	Penyusunan	Jumlah Peta	1	1	1	1	100,00	1	3	300
04	Peta	Ketahanan					%			<b>%</b>
2.01	Kerentanan	Pangan dan								
	dan	Kerentanan								
	Ketahanan	Pangan yang								
	Pangan	disusun								
• • • •	Kecamatan						100.00			200
2 09	Penyusunan,	Peta dan	1	0	1	1	100,00	1	2	200
04	Pemutakhiran	Analisis					%			%
2.01	dan Analisis	Ketahanan								
01	Peta	dan								
	Ketahanan	Kerentanan								
	dan	Pangan								

	Kerentanan Pangan									
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung rentan rawan pangan yang ditangani	12	10	10	10	100,00 %	10	30	250 %
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/K	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	12	2	10	10	100,00 %	10	22	183 %
2 09 05	PROGRAM PENGAWA SAN KEAMANA N PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	95	90	90	90	100,00 %	95	275	289 %

2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	9	9	9	9	100,00 %	9	27	300 %
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerag Kabupaten/K ota yang Dibina	12	7	10	10	100,00 %	10	27	225 %
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	12	10	10	12	120,00 %	10	32	267 %

2 09	Penyediaan	jumlah sarana	12	3	27	02	7,41%	8	13	108
05	Sarana dan	dan prasarana	12	3	21	02	7,4170	0	13	%
2.01		-								70
	Prasarana	pengujian								
05	Pengujian	mutu dan								
	Mutu dan	keamanan								
	Keamanan	pangan Segar								
	Pangan Segar	Asal								
	Asal	Tumbuhan								
	Tumbuhan	Daerah								
	Daerah	Kabupaten								
	Kabupaten/K									
	ota									
3 27	PROGRAM	Presentase	10	4	6	6	100,00	8	18	180
02	PENYEDIA	peningkatan					%			%
	AN DAN	pendamping								
	PENGEMB	an sarana								
	ANGAN	produksi								
	SARANA	pertanian								
	PERTANIA	utama (padi								
	N	& cabai)								
3 27	Pengawasan	Persentase	6	3	4	4	100,00	5	12	200
02	Penggunaan	pengawasan					%			%
2.01	Sarana	penggunaan								
	Pertanian	sarana								
		pertanian								

3 27 03 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	28	28	28	28	100,00 %	28	84	300 %
3 27 04 2.01 02	dan Spesifik Lokasi Pendampinga n Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampinga n Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	96	58	84	84	100,00 %	90	232	242 %
3 27 03	PROGRAM PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN PRASARAN A PERTANIA	Persentase prasarana yang digunakan	99,96	99,96	99,96	99,96	100,00 %	99,96	299, 88	300 %

3 27	Pengembang	Persentase	100	43,3	62,9	62,9	100,00	82,5	188,	189
03 01	an	lahan sawah					%		7	<b>%</b>
	Prasarana	yang terdata								
	Pertanian									
3 27	Pengelolaan	Lahan	12000	15000	12500	12500	100,00	15000	425	354
03 01	Lahan	Pertanian					%		00	%
01	Pertanian	Pangan								
	Pangan	Berkelanjuta								
	Berkelanjuta	n/LP2B,								
	n/LP2B,	Kawasan								
	Kawasan	Pertanian								
	PertanianPan	Pangan								
	gan	Berkelanjuta								
	Berkelanjuta	n/KP2B dan								
	n/KP2B dan	Lahan								
	Lahan	Cadangan								
	Cadangan	Pertanian								
	Pertanian	Pangan								
	Pangan	Berkelanjuta								
	Berkelanjuta	n/LCP2B								
	n/LCP2B	yang dikelola								
3 27	Koordinasi	Jumlah	5	0	5	5	100,00	5	10	200
03 01	dan	koordinasi					%			%
03	Sinkronisasi	dan								
	Prasarana	sinkronisasi								
	Pendukung	prasarana								
	Pertanian	pendukung								
	lainnya	pertanian								1

		lainnya								
3 27 03 02	Pembangun an Prasarana Pertanian	Persentase lahan sawah yang terairi	87,3	86,3	86,6	86,6	100,00	87	259, 9	298 %
3 27 03 02 01	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5	8	4	3	75,00 %	5	16	320 %
3 27 03 02 02	Pembanguna n,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	3	0	0	0,00%	3	6	300 %

3 27 03 02 03	Pembanguna n,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	3	4	4	100,00 %	2	9	450 %
3 27 03 02 04	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembanguna n, Rehabiitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	5	5	0	0	0,00%	5	10	200 %
3 27 03 02 08	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungny a	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungny a yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	0	0	0	0,00%	5	5	100 %
3 27 03 02 05	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	19	7	7	7	100,00 %	19	33	174 %

	Prasarana Pertanian Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara								
3 27 05	PROGRAM PENGEND ALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANIA	Persentase fasilitasi penangangg ulangan bencana	11,77	12,02	11,9	11,9	100,00 %	11,83	35,7 5	304 %
3.27.0 5.2.01	Pengendalia n dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalia n dan penanggulan gan bencana pertanian	31,33	22,98	25,07	25,07	100,00 %	28,2	76,2 5	243 %
3 27 05 01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Luas Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	2000	1000	1400	1400	100,00 %	1700	410	205 %

	Hortikultura, dan Perkebunan	Pangan dan Hortikultura								
3 27 07 01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	1000	1000	0	0	0,00%	1000	200	200 %
3 27 07 01 05	Penanggulan gan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Luas Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	1000	0	0	0	0,00%	1000	100	100 %

3 27 07	PROGRAM PENYULU HAN PERTANIA N	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaa n penyuluh	4,5	4,1	4,5	4,5	100,00 %	4,5	13,1	291 %
3.27.0 7.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	0,75	0,75	0,75	0,75	100,00	0,75	2,25	300 %
3 27 07 01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	50	50	50	50	100,00 %	50	150	300 %
3 27 07 01 02	Pengembang an Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya	200	74	200	200	100,00 %	200	474	237 %

3 27 07 01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan	28	28	28	28	100,00 %	28	84	300 %
	Prasarana Penyuluhan	kapasitasnya								
	Pertanian									
3 27	Pembentukan	Jumlah	10	10	0	0	0,00%	10	20	200
07 01	Badan Usaha	BUMP yang								%
04	Milik Petani	dibentuk								
3 27	Pembentukan	Jumlah	24	24	24	20	83,33	24	68	283
07 01	dan	Sekolah					%			%
05	Penyelenggar	Lapang								
	aan Sekolah	Kelompok								
	Lapang	Tani yang								
	Kelompok	Terbentuk								
	Tani	dan								
	Tingkat	Beroperasi								
	Kabupaten/K									
	ota									
	TOTAL		17899	18612	15673	15637	99,77 %	20459	547 08	306 %

# 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Secara umum keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada table T-C.30. Berdasarkan table tersebut diperoleh data bahwa ada beberapa indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultur yang melebihi target dan ada juga yang di bawah target. Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi dan Presentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Sedangkan untuk Rasio Ketersediaan Pangan Utama tercapai 57,98%. Ketidak tercapaian ini disebabkan oleh adanya pengalihan lahan sawah yang harusnya ditanam padi dialihkan pada tanaman jagung dan singkong. Selain itu juga disebabkan oleh adanya organisme pengganggu tanaman, dan sarana prasarana yang belum maksimal.Sehingga produktivitas padi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan tingkat produksi padi tahun lalu, tonase yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 489.448 ton padi (281.360 ton beras) menjadi 540.115 ton padi (310.487 ton beras).

Indikator kinerja selanjutnya yaitu Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura. Jumlah produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dicapai pada tahun 2022. Belum tercapainya target produksi jagung dipengaruhi oleh serangan hama (tikus) sehingga produksi jagung belum mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian bila dibandingkan dengan produksi jagung di tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan (18,84 %) yaitu dari 515.595, 85 ton menjadi 612.758,75 ton

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Sasaran	Indikator	SPM/Sta	IKK	Target I	Renstra Po	erangkat l	Daerah	Realisasi (	Capaian	Proyeks	i	Catat
	Strategis		ndar		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	an
			Nasional		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anali
													sis
	Meningka	Skor Pola	-	Skore	86,7	89	89,3	90	88,9	89	89,3	90	
	tnya	Pangan		PPH									
	Ketahana	Harapan											
	n Pangan	(PPH)											
	Daerah	(Konsumsi)											
		Presentase	-	-	80	85	85	90	80	85	85	90	
		tingkat											
		keamanan											
		pangan segar											
		yang diuji											
		(Persen)											
		Rasio	-	-	391,65	401,77	407,65	408,00	227,07	401,77	407,65	408,00	
		Ketersediaan											

	pangan											
	Utama											
	(kg/pend/thn)											
Meningka	Jumlah	-	-									
tnya	produksi											
produksi	komoditas											
dan	utama											
produktiv	tanaman											
itas	pangan dan											
komodita	hortikultura:											
s utama												
tanaman												
pangan												
dan												
hortikultu												
ra												
	Padi (ton)	-	-	602.59	606,13	609,69	613,28	540.115	606,13	609,69	613,28	
				1	5	9	5		5	9	5	
	Jagung (ton)	-	-	655.09	655.09	655.09	655.09	612.758,	655.09	655.09	655.09	

				4	4	4	4	75	4	4	4	
	Ubi kayu	-	-	2.981.	2.981.	2.981.	2.981.	2.611.19	2.981.	2.981.	2.981.	
	(ton)			460	460	460	460	4,70	460	460	460	
	Cabe besar	-	-	4.750,	4.750,	4.750,	4.750,	2.685,75	4.750,	4.750,	4.750,	
	(ton)			07	07	07	07		07	07	07	
	Bawang	-	-	49,5	60	65	65	186,31	60	65	65	
	merah (ton)											
	Jamur (ku)	-	-	450	450	450	450	469,15	450	450	450	
Meningka	Persentase	-	Kontri	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	
tnya nilai	pertumbuhan		busi									
tambah	PDRB		sektor									
tanaman	subsektor		pertani									
pangan	tanaman		an,									
dan	pangan		kehuta									
hortikultu			nan									
ra			perikan									
			an									
			terhada									
			p									

				PDRB									
		Persentase	-	Kontri	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	
		pertumbuhan		busi									
		PDRB		sektor									
		subsektor		pertani									
		tanaman		an,									
		hortikultura		kehuta									
				nan									
				perikan									
				an									
				terhada									
				p									
				PDRB									
4	Meningka	Nilai SAKIP	-	-	В	В	В	В	В	В	В	В	
	tkan tata	Dinas											
	kelola	Pertanian											
	managem	TPH hasil											
	en	penilaian											
	internal	Inspektorat											

Dinas						
Pertanian						
TPH						
Lampung						
Tengah						

Produksi komoditas padi juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Target yang dicapai baru mencapai 72,87%. Hal ini dikarenakan irigasi yang belum optimal, adanya organisme pengganggu tanaman dan pengalihan lahan sawah menjadi lahan pertanian lainnya. Meskipun demikian produksi padi tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10.35 %. Produksi padi pada tahun 2021 sebesar 489.448 ton dan 2022 sebesar 540.115 ton. Begitu juga dengan produksi Ubi kayu mengalami peningkatan sebesar 18,23%. Produksi Ubi Kayu pada tahun 2021 sebesar 2.208.519,48 ton dan 2022 sebesar 2.611.194,70 ton.Secara rinci perkembangan jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tahun 2021 – 2022

No			(Ha) ivitas (ku/ha		ivitas		Produksi (To		
		2021	2022 *	2021	2022*	2021	2022*	2021	2022*
1.	Padi	112.026, 00	104.695 ,41	100.291,0	101.743,0 0	48,92	53,09	489.448,00	540.115,00
2.	Jagung	76.499,6 0	78.891, 00	69.229,30	82.758,00	62,45	74,04	515.595,85	612.758,75
3.	Ubi Kayu	65.159,0 6	98.888, 00	77.038,10	91.145,00	247,39	286,49	2.208.519, 48	2.611.194,7 0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah

Ket : \*): Angka Sementara DKPTPH Lampung Tengah

Pada tahun 2022 jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura unggulan mengalami penurunan. Cabe besar menurun sebesar 41,31 persen dari 45.766,69 Ku ditahun 2021 menjadi 26.857,51 Ku di tahun 2022.Sedangkan untuk produk cabe kecil, bawang merah, dan nanas mengalami peningkatan. Cabe kecil produksinya meningkat 15,59% dari 5.677,97 Ku di tahun 2021 menjadi 6.563,15 Ku di tahun 2022.

Produksi bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 1.116,92% dari 153,10 Ku di tahun 2021 menjadi 1.863,10 Ku di tahun 2022. Produksi nanas mengalami peningkatan sebesar 24,67% dari 305.119,78 Ku di tahun 2021 menjadi 380.403,63 Ku di tahun 2022. Sedangkan untuk produksi jamur mengalami penurunan sebesar 6,03% dari 4.992,04 Ku di tahun 2021 menjadi 4.691,15 Ku di tahun 2022. Menurunnya produksi unggulan hortikultura ini dipengaruhi oleh :

- Pengalihan lahan cabe besar menjadi lahan cabe kecil dan bawang merah sehingga luas tanam mengalami penurunan
- 2. Sistem budidaya masih dilakukan secara tradisional
- 3. Penerapan GAP / SOP budidaya belum optimal.
- 4. Penanganan pasca panen masih rendah dan belum optimal menyebabkan daya saing produk lemah. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur pasca panen (gudang pasca panen).

Secara rinci perkembangan luas tanam, luas panen dan produksi komoditas tanaman hortikultura tahun 2021 – 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan Tahun 2021-2022

No.	KOMODITA	Luas T (Ha)	<b>Tanam</b>	Luas I (Ha)	Panen	Prod	uksi (Ku)
110.	S	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Cabe besar	657,75	483,00	752,75	588,75	45.766,69	26.857,51
2.	Cabe kecil	162,00	238,00	217,00	272,00	5.677,97	6.563,15
3.	Bawang merah	19,00	31,75	12,00	27,25	153,10	1.863,10
4.	Nanas petani	70,00	215,00	363,18	345,96	305.119,78	380.403,63
5.	Jamur	6,52	1,65	6,48	1,62	4.992,04	4.691,15

Sumber: Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Tengah (Angka Sementara)

Tidak terdapatnya realisasi persentase pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikuktura dikarenakan tidak tersedianya data tersebut di Badan Pusat Statistik dipengaruhi oleh berubahnya metoda perhitungan dan sajian data di BPS itu sendiri. Tercapainya nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan membaiknya tata kelola managemen internal Dinas Pertanian TPH.

Selain hal-hal tersebut di atas, keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian melibatkan penyuluh pertanian yang berjumlah 246 orang terdiri dari penyuluh PNS, THL-TB dan swakarsa yang memberikan pembinaan dengan latihan dan kunjungan kepada 1.142 kelompok yang mendapatkan bantuan program dan kegiatan serta partisipasi lembaga tani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 6.624 kelompok yang terdiri dari unsur kelompok tani, gapoktan, KEP, P3A, GP3A, UPJA dan kelompok penangkar benih.

Tabel 3. Jumlah Lembaga Tani Tahun 2021 – 2022

	Tuoot 5. vannan Bemouga Tam Tanan 202		
No	Lemba ga tani	2021	202 2
1	Jumlah Kelompok Tani	5.131	5.164
2	Jumlah Gapoktan	331	331
3	Jumlah KEP	69	63
4	Jumlah P3A	273	291
5	Jumlah GP3A	24	24
6	Jumlah UPJA	117	119
7	Jumlah kelompok penangkar benih	45	45
8	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat Bantuan dari Pemerintah	1.142	1.142

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Tabel 4. Perkembangan peningkatan kemampuan kelompok tani Tahun 2021-2022

No.	Kelompok Tani	2021	2022
	_		
1	Pemula	2.825	2.858
2	Lanjut	1.874	1.874
3	Madya	422	422
	,		
4	Utama	10	10
	Jumlah Kelompok Tani	5.131	5.164
	•		

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2021–2022

No.	Jumlah penyuluh	2021	2022
1	PNS	98	93
2	THL-TB	123	52
3	PPPK	0	71
	JUMLAH	221	216

# Tabel 6. SITUASI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

No	Komoditas	Produksi (ton)		/Pakan cecer	Ketersediaan (TON)	Jumlah Penduduk	Komsumsi Kapita	Total Komsumsi	Surplus/Minus Ketersediaan	Ketersediaan/ Komsumsi
			%	(ton)	` ,	(Jiwa) (Kg/Kap/Thn)		(ton)	(Ton)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Padi (GKG)	489.448	7.3	35.730						
	Beras	458.042	1.3	5.955	452.087	1.500.022	78,12	117.182	334.906	385,80
2	Jagung	515.596	11,0	56.716	458.880	1.500.022	0,12	180	458.700	254929,84
3	Kedelai	77	5,0	4	73	1.500.022	0,01	15	58	487,66
4	Kacang Tanah	414	5,0	21	393	1.500.022	0,12	180	213	218,50
5	Kacang Hijau	236	7,0	17	219	1.500.022	0,28	420	(201)	52,26
6	Ubi Kayu	2.208.519	15,0	331.278	1.877.241	1.500.022	4,68	7.020	1.870.221	26740,93
7	Ubi Jalar	1.832	12,0	220	1.612	1.500.022	2,04	3.060	(1.448)	52,68
8	Buah-buahan	80.387	10,0	8.039	72.348	1.500.022	16,29	24.435	47.913	296,08
9	Sayuran	864	10,0	86	778	1.500.022	87,32	130.982	(130.204)	0,59
10 11	Daging Susu	11.996	5,0 5.7	600	11.996	1.500.022	5,57 0,48	8.355	3.641 (720)	143,58 0,00

## Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

						1.500.022		720		
12	Telur	33.320	3,9	1.299	32.021	1.500.022	11,26	16.890	15.130	189,58
13	Ikan	41.532	15,0	6.230	35.302	1.500.022	12,62	18.930	16.372	186,49
14	Gula Minyak	526.902			526.902	1.500.022	6,90	10.350	516.552	5090,77
15	Goreng/cpo	198.803			198.803	1.500.022	22,95	34.426	164.377	577,49

Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan/Perikanan dan Dinas Perkebunan/Kehutanan (Diolah Kembali) Keterangan data ( ) Menunjukkan Minus

Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan, ketersediaan pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 untuk kelompok pangan ;

- Padi-padian untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk melebihi target kebutuhan, untuk beras surplus 334.906 ton dari sisi ketersediaan dan jagung 458.700 ton. Ketersediaan padi-padian di Kabupaten Lampung Tengah tidak bermasalah dan surplusnya didistribusikan keluar Kabupaten Lampung Tengah.
- Makanan berpati, untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk, untuk ubi jalar minus 1.448 ton dan ubi kayu 1.870.221 ton.
- Gula untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk khususnya gula pasir mengalami surplus sebesar 516.552 ton yang di peroleh dari perkebunan tebu di kabupaten lampung tengah.
- Buah biji berminyak untuk ketersediaan pangan penduduk untuk kacang tanah lepas kulit terjadi surplus produksi sebayak 213 ton, begitu pula kedelai terjadi kelebihan produksi 58 ton. Sehingga kelebihannya di ekspor keluar kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan kacang hijau terjadi kekurangan produksi untuk konsumsi sebayak 201 ton sehingga diperlukan pasokan dari luar kabupaten lampung tengah (impor).
- Buah-buahan; untuk ketersediaan pangan buah-buahan berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk dan terjadi kelebihan sebanyak 47.913 ton yang diekpor keluar kabupaten lampung tengah.
- Sayur-sayuran; untuk ketersediaan pangan sayur-sayuran untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk terjadi kekurangan ketersediaan sebanyak 130.204 ton. Sehingga diperlukan pasokan dari luar kabupaten lampung tengah.
- Daging; untuk ketersediaan pangan berlebih untuk pemenuhan konsumsi lampung tengah dan terjadi kelebihan ketersediaan sebanyak 3.641 ton.
- Telur; untuk ketersediaan pangan telur berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk karena terjadi kelebihan produksi telur sebanyak 15.130 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.

- Ikan; ketersediaan pangan ikan berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk lampung tengah, dan terjadi kelebihan produksi ikan sebanyak 16.372 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.
- Minyak dan lemak; untuk ketersediaan pangan minyak dan lemak berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk dan terjadi kelebihan ketersediaan sebanyak 164.377 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.

Tabel 7. Komposisi Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Tal	nun	Keterangan
110	recompose a ungun	Tahun 2021	Tahun 2022	Teterungun
1.	Padi-padian	25,0	25,0	Tidak Bermasah
2.	Umbi-umbian	1,7	2,5	Tidak Bermasalah
3.	Pangan hewani	18,5	20,0	Tidak Bermasalah
4.	Minyak dan lemak	5,0	5,0	Tidak Bermasalah
5.	Buah Biji Berminyak	1.0	1,0	Tidak Bermasalah
6.	Kacang-kacangan	5,9	0,3	Tidak Bermasalah
7.	Gula	2,2	2,5	Tidak Bermasalah
8.	Sayuran dan buah	28,3	30,0	Tidak Bermasalah
9.	Lain-lain	0,00	0,00	Tidak Bermasalah
	Total	87,5	86,31	

# 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait menyebabkan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura sudah sangat baik. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mampu berkontribusi untuk mendukung misi ke-3 Bupati Lampung Tengah yaitu meningkatkan Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya). Tidak hanya memiliki kontribusi yang baik di tingkat Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura juga unjuk gigi di kancah Propinsi dan Nasional dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai sehingga membawa nama harum Bupati Lampung Tengah. Adapun prestasi-prestasi tersebut diantaranya

- Juara I Lomba Cerdas Cermat Kelompok Tani Tingkat Nasional tahun
   An. Kelompok Tani Gapsera Sejahtera Mandiri Kec. Seputih
   Raman
- Terbaik I Tingkat Provinsi Sebagai Petugas Data Statistik Hortikultura Tahun 2022 An. Bagus Juni Purnomo, S.TP
- 3. Peringkat I Kategori BPP Terbaik Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. BPP Kec. Sendang Agung.
- Peringkat I Kategori Penyuluh Pertanian Terbaik Se-Provinsi Lampung
   Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB)
   Award Tahun 2022 An. Alfonsus Winarso.
- Peringkat I Kategori Kios Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Gapoktan Karya Mandiri.
- 6. Kategori Kelompok Tani Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Kelompok Tani Sari Bumi.

- 7. Peringkat III Kategori Penyuluh Pertanian Terbaik Se-Provinsi Lampung An. Susilo.
- Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional a.n. Retno Sawitri, SP.
   (PPL) Tahun 2021
- 9. Gapoktan Berprestasi Juara 1 Tingkat provinsi a.n. Usaha Tani Tahun 2021
- 10. Petani Berprestasi Juara II Tingkat Provinsi a.n. Amin Rosidin (Petani) pada Tahun 2021
- 11. Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi juara II Tingkat Provinsi a.n. KWT Melati Putih pada Tahun 2021
- 12. Penyuluh Pertanian Berprestasi Juara III Tingkat Provinsi a.n. Nuryati, SP. (PPL) Tahun 2021
- 13. Juara 2 nasional produktivitas kedelai a.n. kelompok tani Rukun Makmur1, Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung Tahun 2022
- 14. Juara 1 Tingkat Provinsi Produktivitas GKG a.n. Kelompok Tani Usaha Bersama IV Kampung Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Tahun 2022
- 15. Juara 2 Tingkat Provinsi Produktivitas Jagung Tongkol Basah/Kering Panen a.n. Kelompok Tani Periangan Jaya Kampung Riau Periangan Kecamatan Pubian tahun 2022
- 16. Juara Harapan I Tingkat Provinsi a.n. KWT Sekar Arum, kp. Rejo Asri, kec. Sep Raman Tahun 2021
- 17. Nominasi Juara 4 Tingkat Nasional Produktivitas Jagung Tongkol Basah/Kering Panen a.n. Kelompok Tani Periangan Jaya Kampung Riau Periangan Kecamatan Pubian Tahun 2022

## A. Halangan

Capaian kinerja yang baik dan banyaknya prestasi yang diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bukan berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak ada halangan atau tantangan. Tantangan yang dihadapi juga cukup besar. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura diantaranya:

- 1. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
- 2. Menurunnya kualitas sumber daya lahan
- 3. Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia
- 4. Tingginya biaya agroinput (sarana produksi pertanian)
- 5. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani
- 6. Daya saing produk hortikultura masih rendah
- 7. Keterlambatan penyediaan pupuk bersubsidi
- 8. Perubahan iklim yang ekstrim mempengaruhi pola tanam dan serangan hama / penyakit.

#### B. Peluang

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura, antara lain :

- 1. Komitmen dari Kepala Daerah bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai sektor unggulan.
- 2. Adanya permintaan pasar akan produk tanaman pangan dan hortikultura terutama produk olahan pangan lokal dari Kelompok Wanita Tani (KWT).
- 3. Dukungan lembaga keuangan untuk pengembangan usaha dan pembiayaan pertanian

Faktor-faktor diatas merupakan peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan dengan adanya peluang-peluang tersebut Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanannya.

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kerusakan lingkungan, penurunan kualitas lahan, dan diperburuk oleh dampak perubahan iklim global.
- 2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan dan meningkatnya beban produksi tanaman bahan pangan.
- 4. Tingkat aplikasi teknologi tepat guna/anjuran yang belum optimal di tingkat petani.
- 5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani;
- 6. Tingginya ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia;
- 7. Masih rendahnya harga yang diterima petani, terutama pada masa panen raya, sehingga tidak mendorong petani untuk berproduksi;
- 8. Persaingan pemanfaatan lahan dengan tanaman semusim lainnya;
- 9. Tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
- 10. Meningkatnya serangan OPT akibat pola tanam monokultur yang terus menerus dan penggunaan pestisida yang tidak sesuai dosis anjuran.

- 11. Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
- 12. Konsumsi energi sebagian besar dari padi-padian dan bias ke beras.
- 13. Kelembagaan pemasaran belum mampu berperan baik sebagai penyangga kestabilan distribusi maupun harga pangan. Pada masa panen, pasokan pangan berlimpah kepasar sehingga menekan harga produk pertanian dan mengurangi keuntungan usaha tani. Sebaliknya pada masa paceklik atau masa dimana panen tidak berhasil, harga meningkat dengan tajam, sehingga mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- 14. Keamanan jalur distribusi dan adanya pungutan sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan.
- 15. Adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia akan tetapi di seluruh dunia sehingga menyebabkan semua aspek dari pangan, pendidikan, kesehatan, industri cukup terganggu.
- 16. Sistem Perbenihan yang kurang berjalan optimal.
- 17. Kualitas produk tanaman yang dihasilkan petani belum sepenuhnya memenuhi standar pabrik pakan.
- 18. Persaingan Produk Pertanian dengan Produk Impor.
- 19. Sumber daya ditingkat UPT Dinas yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu instrument untuk menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Kerja (Renja) berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, sedangkan RKPD digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. RKPD juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh pemangku kepentingan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31 dibawah ini

# Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No	Rancangan A	wal R	RKPD			Hasil Analisis	s Keb	utuhan			Cat
	Program/Ke	Lo	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/Ke	Lo	Indikator Kinerja	Targ	Kebutuhan	ata
	giatan	ka		Capai	indikatif	giatan	ka		et	Dana	n
		si		an			si		Capa		Pe
									ian		nti
											ng
1	PROGRA		Persentase Desa			PROGRA		Persentase Desa			
	M		Dengan			M		Dengan			
	PENGELO		Kemandirian			PENGELO		Kemandirian			
	LAAN		Pangan			LAAN		Pangan			
	SUMBER					SUMBER					
	DAYA					DAYA					
	EKONOMI					EKONOMI					
	UNTUK					UNTUK					
	KEDAULA					KEDAULA					
	TAN dan					TAN dan					
	KEMANDI					KEMANDI					

				<del>_</del>
	RIAN		RIAN	
	PANGAN		PANGAN	
		Persentase	P	Persentase
		Kampung yang	K	Kampung yang
		telah memiliki	te	elah memiliki
		lumbung pangan	lu	umbung pangan
		masyarakat		nasyarakat
				liasyarakat
1.1	Penyediaan	Jumlah	Penyediaan	
	Infrastrukt	Infrastruktur	Infrastrukt	
	ur dan	pergudangan dan	ur dan	
	Seluruh	sarana pendukung	Seluruh	
	Pendukung	lainnya untuk	Pendukung	
	Kemandiri	penyimpanan	Kemandiri	
	an Pangan	cadangan pangan	an Pangan	
	sesuai	yang disediakan	sesuai	
	Kewenanga		Kewenanga	
1				

	n Daerah Kabupaten/ Kota				n Daerah Kabupaten/ Kota				
1.1.	Penyediaan	Jumlah Lumbung	7 Unit	Rp	Penyediaan	Jumlah Lumbung	-	Rp	
1	Infrastruktur	Pangan yang		9.000.000.	Infrastruktur	Pangan yang		-	
	Lumbung	Tersedia		000	Lumbung	Tersedia			
	Pangan				Pangan				
1.1.	Penyediaan	Jumlah Infrastruktur	14	Rp	Penyediaan	Jumlah Infrastruktur	-	Rp	
2	Infrastruktur	Pendukung	kecam	480.756.0	Infrastruktur	Pendukung		-	
	Pendukung	Kemandirian	atan	00	Pendukung	Kemandirian			
	Kemandiria	Pangan yang			Kemandiria	Pangan yang			
	n Pangan	Tersedia			n Pangan	Tersedia			
	Lainnya				Lainnya				

2	PROGRA	Rasio cadangan	PROGRA	Rasio cadangan	
	M	pangan	M	pangan	
	PENINGK	masyarakat	PENINGK	masyarakat	
	ATAN	terhadap	ATAN	terhadap	
	DIVERSIF	kebutuhan pangan	DIVERSIF	kebutuhan pangan	
	IKASI	(beras)	IKASI	(beras)	
	DAN		DAN		
	KETAHAN		KETAHAN		
	AN		AN		
	PANGAN		PANGAN		
	MASYAR		MASYAR		
	AKAT		AKAT		
		Persentase		Persentase	
		ketersediaan		ketersediaan	
		pangan		pangan	
		Konsumsi Beras		Konsumsi Beras	
		(Kg/Kapita/Tahun		(Kg/Kapita/Tahun	
		)		)	

Konsumsi	Konsumsi
Kelompok Pangan	Kelompok Pangan
Buah dan Sayur	Buah dan Sayur
(Kg/Kapita/Tahun	(Kg/Kapita/Tahun
)	
Konsumsi	Konsumsi
Kelompok Pangan	Kelompok Pangan
Hewani	Hewani
(Kg/Kapita/Tahun	(Kg/Kapita/Tahun

2.1	Penyediaan	Persentase	Penyediaan	Persentase
	dan	penyediaan dan	dan	penyediaan dan
	Penyaluran	penyaluran	Penyaluran	penyaluran
	Pangan	pangan pokok atau	Pangan	pangan pokok atau
	Pokok atau	pangan lainnya	Pokok atau	pangan lainnya
	Pangan	sesuai dengan	Pangan	sesuai dengan
	Lainnya	kebutuhan daerah	Lainnya	kebutuhan daerah
	sesuai		sesuai	
	dengan		dengan	
	Kebutuhan		Kebutuhan	
	Daerah		Daerah	
	Kabupaten/		Kabupaten/	
	Kota dalam		Kota dalam	
	rangka		rangka	
	Stabilisasi		Stabilisasi	
	Pasokan		Pasokan	
	dan Harga		dan Harga	
	Pangan		Pangan	

2.1.	Penyediaan	Pangan Berbasis	1	Rp	Penyediaan	Pangan Berbasis	1	Rp
1	Pangan	Sumber	Lapor	210.000.0	Pangan	Sumber	Lapo	134.410.0
	Berbasis	Daya Lokal yang	an	00	Berbasis	Daya Lokal yang	ran	00
	Sumber	Tersedia			Sumber	Tersedia		
	Daya				Daya			
	Lokal				Lokal			
2.1.	Pemantauan	Pemantauan Stok,	15	Rp	Pemantauan	Pemantauan Stok,	15	Rp
2	Stok,	Pasokan dan Harga	lokasi	91.500.00	Stok,	Pasokan dan Harga	lokas	91.210.50
	Pasokan	Pangan		0	Pasokan	Pangan	i	0
	dan Harga				dan Harga			
	Pangan				Pangan			
2.1.	Pengemban	Jumlah	5	Rp	Pengemban	Jumlah	7	Rp
3	gan	Kelembagaan	lemba	578.500.0	gan	Kelembagaan	lemb	51.928.00
	Kelembagaa	Usaha Pangan	ga	00	Kelembagaa	Usaha Pangan	aga	0
	n Usaha	Masyarakat			n Usaha	Masyarakat		
	Pangan	dan Toko Tani			Pangan	dan Toko Tani		
	Masyarakat	Indonesia			Masyarakat	Indonesia		
	dan	yang			dan	yang		
	Toko Tani	Dikembangkan			Toko Tani	Dikembangkan		

	Indonesia				Indonesia			
2.2	Pengelolaa	Jumlah CCP			Pengelolaa	Jumlah CCP		
	n dan	(Cadangan Pangan			n dan	(Cadangan Pangan		
	Keseimban	Pemerintah) yang			Keseimban	Pemerintah) yang		
	gan	disediakan (Beras)			gan	disediakan (Beras)		
	Cadangan				Cadangan			
	Pangan				Pangan			
	Kabupaten/				Kabupaten/			
	Kota				Kota			
2.2.	Koordinasi	Jumlah Koordinasi	12	Rp	Koordinasi	Jumlah Koordinasi	Rp	
1	dan	danSinkronisasi	kali	161.300.0	dan	danSinkronisasi	-	
	Sinkronisasi	PengendalianCadan		00	Sinkronisasi	PengendalianCadan		
	Pengendalia	gan			Pengendalia	gan		
	n	PanganKabupaten/K			n	PanganKabupaten/K		

	CadanganPa	ota			CadanganPa	ota			
	ngan				ngan				
	Kabupaten/				Kabupaten/				
	Kota				Kota				
2.2.	Penyusunan	Rencana Kebutuhan	14	Rp	Penyusunan	Rencana Kebutuhan	14	Rp	
2	Rencana	Pangan Lokal	lapora	267.500.0	Rencana	Pangan Lokal	lapor	73.492.00	
	Kebutuhan		n	00	Kebutuhan		an	0	
	Pangan				Pangan				
	Lokal				Lokal				
2.2.	Pengadaan	Jumlah Cadangan	30	Rp	Pengadaan	Jumlah Cadangan	10	Rp	
3	Cadangan	Pangan	Ton	475.000.0	Cadangan	Pangan	Ton	97.021.00	
	Pangan	Pemerintah		00	Pangan	Pemerintah		0	
	Pemerintah	Kabupaten/Kota			Pemerintah	Kabupaten/Kota			
	Kabupaten/				Kabupaten/				
	Kota				Kota				

2.3	Pelaksanaa	Persentase			Pelaksanaa	Persentase			
	n	pelaksanaan			n	pelaksanaan			
	Pencapaian	Target Konsumsi			Pencapaian	Target Konsumsi			
	Target	pangan perkapita			Target	pangan perkapita			
	Konsumsi	pertahun			Konsumsi	pertahun			
	Pangan				Pangan				
	Perkapita/				Perkapita/				
	Tahun				Tahun				
	sesuai				sesuai				
	dengan				dengan				
	Angka				Angka				
	Kecukupan				Kecukupan				
	Gizi				Gizi				
2.3.	Penyusunan	Target Konsumsi	1	Rp	Penyusunan	Target Konsumsi	1	Rp	
1	dan	Pangan	Doku	271.400.0	dan	Pangan	Doku	135.008.0	
	Penetapan	Per Kapita Per	men	00	Penetapan	Per Kapita Per	men	00	
	Target	Tahun			Target	Tahun			
	Konsumsi				Konsumsi				
	Pangan Per				Pangan Per				

	Kapita Per				Kapita Per				
	1				-				
	Tahun				Tahun				
2.3.	Pemberdaya	Jumlah	4	Rp	Pemberdaya	Jumlah	2	Rp	
2	an	Pemberdayaan	kelom	280.000.0	an	Pemberdayaan	kelo	92.043.00	
	Masyarakat	Kelompok	pok	00	Masyarakat	Kelompok	mpok	0	
	dalam	Masyarakat			dalam	Masyarakat			
	Penganekar	dalam			Penganekar	dalam			
	agaman	Penganekaragaman			agaman	Penganekaragaman			
	Konsumsi	Konsumsi Pangan			Konsumsi	Konsumsi Pangan			
	Pangan	Berbasis Sumber			Pangan	Berbasis Sumber			
	Berbasis	Daya			Berbasis	Daya			
	Sumber	Lokal			Sumber	Lokal			
	Daya Lokal				Daya Lokal				

2.3.	Koordinasi	Jumlah Koordinasi	12	Rp	Koordinasi	Jumlah Koordinasi 2 kali	Rp
3	dan	dan	kali	612.500.0	dan	dan	89.238.80
	Sinkronisasi	Sinkronisasi		00	Sinkronisasi	Sinkronisasi	0
	Pemantauan	Pemantauan			Pemantauan	Pemantauan	
	dan	dan Evaluasi			dan	dan Evaluasi	
	Evaluasi	Konsumsi			Evaluasi	Konsumsi	
	Konsumsi	Per Kapita Per			Konsumsi	Per Kapita Per	
	per Kapita	Tahun			per Kapita	Tahun	
	per				per		
	Tahun				Tahun		
3	PROGRA	Persentase daerah			PROGRA	Persentase daerah	
	M	rentan rawan			M	rentan rawan	
	PENANGA	pangan			PENANGA	pangan	
	NAN				NAN		
	KERAWA				KERAWA		
	NAN				NAN		
	PANGAN				PANGAN		

3.1	Penyusuna	Jumlah	Peta			Penyusuna	Jumlah Peta			
	n Peta	Ketahanan	Pangan			n Peta	Ketahanan Pangan			
	Kerentana	dan Ker	entanan			Kerentana	dan Kerentanan			
	n dan	Pangan	yang			n dan	Pangan yang			
	Ketahanan	disusun				Ketahanan	disusun			
	Pangan					Pangan				
	Kecamatan					Kecamatan				
3.1.	Penyusunan	Peta dan	Analisis	1	Rp	Penyusunan	Peta dan Analisis	1	Rp	
1	,	Ketahanan	dan	Doku	117.500.0	,	Ketahanan dan	Doku	43.938.00	
	Pemutakhira	Kerentanan	Pangan	men	00	Pemutakhira	Kerentanan Pangan	men	0	
	n	yang				n	yang			
	dan Analisis	Dimutahirka	an			dan Analisis	Dimutahirkan			
	Peta					Peta				
	Ketahanan					Ketahanan				
	dan					dan				
	Kerentanan					Kerentanan				
	Pangan					Pangan				

3.2	Penangana	Jumlah Kampung			Penangana	Jumlah Kampung			
	n	Rentan Rawan			n	Rentan Rawan			
	Kerawanan	Pangan yang			Kerawanan	Pangan yang			
	Pangan	ditangani			Pangan	ditangani			
	Kewenanga				Kewenanga				
	n				n				
	Kabupaten/				Kabupaten/				
	Kota				Kota				
3.2.	Koordinasi	Jumlah Koordinasi	12	Rp	Koordinasi	Jumlah Koordinasi	5 kali	Rp	
1	dan	dan	kali	320.675.0	dan	dan		76.294.00	
	Sinkronisasi	Sinkronisasi		00	Sinkronisasi	Sinkronisasi		0	
	Penanganan	Penanganan			Penanganan	Penanganan			
	Kerawanan	Kerawanan Pangan			Kerawanan	Kerawanan Pangan			
	Pangan	Kabupaten/Kota			Pangan	Kabupaten/Kota			
	Kabupaten/				Kabupaten/				
	Kota				Kota				

4	PROGRA	Persentase pangan	PROGRA	Persentase pangan	
-					
	M	segar asal	M	segar asal	
	PENGAW	tumbuhan yang	PENGAW	tumbuhan yang	
	ASAN	memenuhi	ASAN	memenuhi	
	KEAMAN	persyaratan mutu	KEAMAN	persyaratan mutu	
	AN	dan keamanan	AN	dan keamanan	
	PANGAN	pangan	PANGAN	pangan	
4.1	Pelaksanaa	Jumlah sampel	Pelaksanaa	Jumlah sampel	
	n	pangan segar yang	n	pangan segar yang	
	Pengawasa	diawasi	Pengawasa	diawasi	
	n		n		
	Keamanan		Keamanan		
	Pangan		Pangan		
	Segar		Segar		
	Daerah		Daerah		
	Kabupaten/		Kabupaten/		
	Kota		Kota		

		Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan pangan segar yang disusun				Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan pangan segar yang disusun		
4.1.	Penguatan	KelembagaanKeam	12	Rp	Penguatan	KelembagaanKeam	10	Rp
1	Kelembagaa	anan	kelom	395.700.0	Kelembagaa	anan	lemb	39.495.00
	n	Pangan Segar	pok	00	n	Pangan Segar	aga	0
	Keamanan	Daerah			Keamanan	Daerah		
	Pangan	Kabupaten/Kota			Pangan	Kabupaten/Kota		
	Segar	yang			Segar	yang		
	Daerah	Dibina			Daerah	Dibina		
	Kabupaten/				Kabupaten/			
	Kota				Kota			
4.1.	Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi	12	Rp	Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi	10	Rp
2	Keamanan	Keamanan Pangan	kecam	110.500.0	Keamanan	Keamanan Pangan	keca	40.095.00
	Pangan	Segar	atan	00	Pangan	Segar	mata	0
	Segar Asal	Asal Tumbuhan			Segar Asal	Asal Tumbuhan	n	
	Tumbuhan	Daerah			Tumbuhan	Daerah		

	Daerah	Kabupaten/Kota			Daerah	Kabupaten/Kota			
	Kabupaten/				Kabupaten/				
	Kota				Kota				
4.1.	Penyediaan	Jumlah Sarana	12	Rp	Penyediaan	Jumlah Sarana	5	Rp	
3	Sarana	danPrasarana	lokasi	325.400.0	Sarana	danPrasarana	lokas	50.968.50	
	danPrasaran	Pengujian Mutudan		00	danPrasaran	Pengujian Mutudan	i	0	
	a Pengujian	Keamanan			a Pengujian	Keamanan			
	Mutudan	PanganSegar Asal			Mutudan	PanganSegar Asal			
	Keamanan	TumbuhanDaerah			Keamanan	TumbuhanDaerah			
	PanganSega	Kabupaten/Kota			PanganSega	Kabupaten/Kota			
	r Asal				r Asal				
	TumbuhanD				TumbuhanD				
	aerah				aerah				
	Kabupaten/				Kabupaten/				
	Kota				Kota				

5	PROGRA	Persentase	PROGRA	Persentase	
	M	dokumen	M	dokumen	
	PENUNJA	perencanaan,	PENUNJA	perencanaan,	
	NG	penganggaran, dan	NG	penganggaran, dan	
	URUSAN	evaluasi kinerja	URUSAN	evaluasi kinerja	
	PEMERIN	Perangkat Daerah	PEMERIN	Perangkat Daerah	
	TAHAN	yang disusun	TAHAN	yang disusun	
	DAERAH	sesuai dengan	DAERAH	sesuai dengan	
	KABUPAT	Peraturan	KABUPAT	Peraturan	
	EN/KOTA	Perundang-	EN/KOTA	Perundang-	
		undangan yang		undangan yang	
		berlaku		berlaku	
		Persentase Sarana		Persentase Sarana	
		dan Prasarana		dan Prasarana	
		Kantor dalam		Kantor dalam	
		kondisi baik		kondisi baik	

5.1	Perencanaa	Persentase Jumlah			Perencanaa	Jumlah Dokumen			
	n,	Dokumen			n,	perencanaan,			
	Pengangga	perencanaan,			Pengangga	penganggaran dan			
	ran, dan	penganggaran dan			ran, dan	evaluasi kinerja			
	Evaluasi	evaluasi kinerja			Evaluasi	yang tersedia			
	Kinerja	yang tersedia			Kinerja				
	Perangkat				Perangkat				
	Daerah				Daerah				
5.1.	Penyusunan	Jumlah Dokumen	2	Rp	Penyusunan	Jumlah Dokumen	2	Rp	
1	Dokumen	Perencanaan	Doku	3.500.000	Dokumen	Perencanaan	Doku	3.500.000	
	Perencanaan	Perangkat	men		Perencanaan	Perangkat	men		
	Perangkat	Daerah			Perangkat	Daerah			
	Daerah				Daerah				

<b>5</b> 1	Koordinasi	Tumloh	Dolauman	1	Des	Koordinasi		Iumlah	Dolauman	1	De	
5.1.	Koordinasi	Jumlah	Dokumen	1	Rp	Koorumasi		Jumlah	Dokumen	1	Rp	
2	dan	RKASKP	D dan	Doku	5.000.000	dan		RKASKPI	O dan	Doku	4.760.000	
	Penyusunan	Laporan	Hasil	men		Penyusunan		Laporan	Hasil	men		
	Dokumen	Koordinas	si			Dokumen		Koordinas	i			
	RKA-SKPD	Penyusun	an			RKA-SKPD		Penyusuna	ın			
		Dokumen	RKA-					Dokumen	RKA-			
		SKPD						SKPD				
5.1.	Koordinasi	Jumlah	Dokumen	1	Rp	Koordinasi		Jumlah	Dokumen	1	Rp	
3	dan	Perubahai	n RKA-	Doku	5.000.000	dan		Perubahan	RKA-	Doku	2.760.000	
	Penyusunan	SKPD	dan	men		Penyusunan		SKPD	dan	men		
	Dokumen	Laporan	Hasil			Dokumen		Laporan	Hasil			
	Perubahan	Koordinas	si			Perubahan		Koordinas	i			
	RKA-SKPD	Penyusun	an			RKA-SKPD		Penyusuna	ın			
		Dokumen						Dokumen				
		Perubahar	n RKA-					Perubahan	RKA-			
		SKPD						SKPD				
1	1	l .		1	I	1	1	1			1	1

5.1.	Koordinasi	Jumlah	Laporan	1	Rp	Koordinasi	Jumlah	Laporan	1	Rp	1
			-	1	-			-		-	
4	danPenyusu	CapaianKin	ierja dan	Lapor	7.500.000	danPenyusu	CapaianK	inerja dan	Lapo	4.030.000	
	nan	IkhtisarReal	lisasi	an		nan	IkhtisarRe	alisasi	ran		
	LaporanCap	Kinerja	SKPD			LaporanCap	Kinerja	SKPD			
	aian Kinerja	danLaporan	Hasil			aian Kinerja	danLapora	an Hasil			
	danIkhtisar	KoordinasiF	Penyusu			danIkhtisar	Koordinas	siPenyusu			
	Realisasi	nan				Realisasi	nan				
	KinerjaSKP	LaporanCap	paian			KinerjaSKP	LaporanC	apaian			
	D	Kinerja da	nIkhtisar			D	Kinerja o	lanIkhtisar			
		Realisasi					Realisasi				
		KinerjaSKP	PD				KinerjaSK	(PD			
5.1.	Evaluasi	Jumlah	Evaluasi	12	Rp	Evaluasi	Jumlah	Laporan	12	Rp	
5	Kinerja	Kinerja P	Perangkat	kali	5.000.000	Kinerja	Evaluasi		kali	2.100.000	
	Perangkat	Daerah				Perangkat	Kinerja	Perangkat			
	Daerah					Daerah	Daerah				
5.2	A J	C-1 1	r			A 3	C-1	T			
5.2	Administra	Cakupan I				Administra	_	Layanan			
	si	administra	si			si	administr	asi			
	Keuangan	Keuangan	yang			Keuangan	Keuangai	n yang			

	Perangkat	tersedia			Perangkat	tersedia			
	Daerah				Daerah				
5.2.	Penyediaan	Jumlah bulan dalam	12	Rp	Penyediaan	Jumlah bulan dalam	12	Rp	
1	Gaji dan	Menerima Gaji dan	bulan	20.831.60	Gaji dan	Menerima Gaji dan	bulan	25.184.97	
	Tunjangan	Tunjangan ASN		1.917	Tunjangan	Tunjangan ASN		6.689	
	ASN				ASN				
5.2.	Penyediaan	Penyediaan	3 jenis	Rp	Penyediaan	Penyediaan	3	Rp	
2	Administras	Administrasi		3.805.600.	Administras	Administrasi	jenis	3.550.976.	
	i	Pelaksanaan Tugas		000	i	Pelaksanaan Tugas		000	
	Pelaksanaan	ASN			Pelaksanaan	ASN			
	Tugas ASN				Tugas ASN				
5.2.	Pengelolaan	Jumlah Dokumen	1	Rp	Pengelolaan	Jumlah Dokumen	1	Rp	
3	dan	Bahan	Doku	3.000.000	dan	Bahan	Doku	3.000.000	
	Penyiapan	Tanggapan	men		Penyiapan	Tanggapan	men		
	Bahan	Pemeriksaan			Bahan	Pemeriksaan			
	Tanggapan	dan Tindak Lanjut			Tanggapan	dan Tindak Lanjut			
	Pemeriksaa	Pemeriksaan			Pemeriksaa	Pemeriksaan			
	n				n				

5.2.	Koordinasi	Jumlah	6	Rp	Koordinasi	Jumlah	6	Rp	
4	danPenyusu	LaporanKeuangan	Lapor	3.000.000	danPenyusu	LaporanKeuangan	Lapo	4.414.000	
	nan	Bulanan/Triwulanan	an		nan	Bulanan/Triwulanan	ran		
	LaporanKeu	/ SemesteranSKPD			LaporanKeu	/ SemesteranSKPD			
	angan	dan			angan	dan			
	Bulanan/Tri	LaporanKoordinasi			Bulanan/Tri	LaporanKoordinasi			
	wulanan/	PenyusunanLaporan			wulanan/	PenyusunanLaporan			
	Semesteran	KeuanganBulanan/T			Semesteran	KeuanganBulanan/T			
	SKPD	riwulanan/Semester			SKPD	riwulanan/Semester			
		an SKPD				an SKPD			
5.3	Administra	Persentase			Administra	Persentase			
	si Umum	pelaksanaan			si Umum	pelaksanaan			
	Perangkat	administrasi			Perangkat	administrasi			
	Daerah	umum yang			Daerah	umum yang			
		terfasilitasi				terfasilitasi			

5.3.	Penyediaan	Jumlah	Paket	1	Rp	Penyediaan	Jumlah	Paket	1	Rp	
			1 akct	1	-	•		Taket		_	
1	Komponen	Komponen		Paket	10.000.00	Komponen	Komponen		Paket	4.850.000	
	Instalasi	Instalasi			0	Instalasi	Instalasi				
	Listrik/Pene	Listrik/Pene	rangan			Listrik/Pene	Listrik/Pene	rangan			
	rangan	Bangunan	Kantor			rangan	Bangunan	Kantor			
	Bangunan	yang				Bangunan	yang				
	Kantor	Disediakan				Kantor	Disediakan				
5.3.	Penyediaan	Jumlah	Paket	10	Rp	Penyediaan	Jumlah	Paket	10	Rp	
2	Peralatan	Peralatan		Paket	246.500.0	Peralatan	Peralatan		Paket	90.314.00	
	dan	dan Perle	ngkapan		00	dan	dan Perle	ngkapan		0	
	Perlengkapa	Kantor				Perlengkapa	Kantor				
	n Kantor	yang Disedia	akan			n Kantor	yang Disedia	akan			
5.3.	Penyediaan	Jumlah	Paket	3	Rp	Penyediaan	Jumlah	Paket	3	Rp	
3	Peralatan	Peralatan		Paket	11.000.00	Peralatan	Peralatan		Paket	3.417.700	
	Rumah	Rumah	Tangga		0	Rumah	Rumah	Tangga			
	Tangga	yang				Tangga	yang				
		Disediakan					Disediakan				

5.3.	Penyediaan	Jumlah Paket Bahan	2	Rp	Penyediaan	Jumlah Paket Bahan	2	Rp	
4	Bahan	Logistik Kantor	Paket	190.000.0	Bahan	Logistik Kantor		123.009.8	
	Logistik	yang		00	Logistik	yang		00	
	Kantor	Disediakan			Kantor	Disediakan			
5.3.	Penyediaan	Jumlah Paket	5	Rp	Penyediaan	Jumlah Paket	5	Rp	
5	Barang	Barang	Paket	50.000.00	Barang	Barang	Paket	28.845.00	
	Cetakan dan	Cetakan dan		0	Cetakan dan	Cetakan dan		0	
	Penggandaa	Penggandaan yang			Penggandaa	Penggandaan yang			
	n	Disediakan			n	Disediakan			
5.3.	Penyelengg	Jumlah	12	Rp	Penyelengg	Jumlah	12	Rp	
6	araan	LaporanPenyelengg	Lapor	380.000.0	araan	LaporanPenyelengg	Lapo	189.070.0	
	RapatKoord	araan	an	00	RapatKoord	araan	ran	00	
	inasi dan	RapatKoordinasi			inasi dan	RapatKoordinasi			
	KonsultasiS	dan			KonsultasiS	dan			
	KPD	KonsultasiSKPD			KPD	KonsultasiSKPD			

5.4	Penyediaan	Persentase			Penyediaan	Persentase			
	Jasa	Ketersediaan jasa			Jasa	Ketersediaan jasa			
	Penunjang	komunikasi,			Penunjang	komunikasi,			
	Urusan	sumber daya air			Urusan	sumber daya air			
	Pemerintah	dan listrik			Pemerintah	dan listrik			
	an Daerah				an Daerah				
5.4.	Penyediaan	Jumlah Laporan	12	Rp	Penyediaan	Jumlah Laporan	12	Rp	
1	Jasa	Penyediaan Jasa	Lapor	400.000.0	Jasa	Penyediaan Jasa	Lapo	396.300.0	
	Komunikasi	Komunikasi,	an	00	Komunikasi	Komunikasi,	ran	00	
	, Sumber	Sumber Daya			, Sumber	Sumber Daya			
	Daya	Air dan Listrik yang			Daya	Air dan Listrik yang			
	Air dan	Disediakan			Air dan	Disediakan			
	Listrik				Listrik				

5.5	Pemelihara	Jumlah Barang			Pemelihara	Jumlah Barang			
	an Barang	Milik Daerah pada			an Barang	Milik Daerah pada			
	Milik	Perangkat Daerah			Milik	Perangkat Daerah			
	Daerah	yang mendapat			Daerah	yang mendapat			
	Penunjang	pemeliharaan			Penunjang	pemeliharaan			
	Urusan				Urusan				
	Pemerintah				Pemerintah				
	an Daerah				an Daerah				
5.5.	Penyediaan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	Rp	Penyediaan	Jumlah Kendaraan	1	Rp	
1	Jasa	Perorangan Dinas		45.000.00	Jasa	Perorangan Dinas	Unit	41.670.00	
	Pemeliharaa	atau		0	Pemeliharaa	atau		0	
	n, Biaya	Kendaraan Dinas			n, Biaya	Kendaraan Dinas			
	Pemeliharaa	Jabatan			Pemeliharaa	Jabatan			
	n, dan Pajak	yang Dipelihara dan			n, dan Pajak	yang Dipelihara dan			
	Kendaraan	dibayarkan			Kendaraan	dibayarkan			
	Perorangan	Pajaknya			Perorangan	Pajaknya			
	Dinas atau				Dinas atau				
	Kendaraan				Kendaraan				
	Dinas				Dinas				

	Jabatan				Jabatan				
5.5.	Penyediaan	Jumlah Kendaraan	2 Unit	Rp	Penyediaan	Jumlah Kendaraan	2	Rp	
2	Jasa	Dinas		75.000.00	Jasa	Dinas	Unit	107.160.0	
	Pemeliharaa	Operasional atau		0	Pemeliharaa	Operasional atau		00	
	n, Biaya	Lapangan yang			n, Biaya	Lapangan yang			
	Pemeliharaa	Dipelihara			Pemeliharaa	Dipelihara			
	n, Pajak dan	dan dibayarkan			n, Pajak dan	dan dibayarkan			
	Perizinan	Pajak dan			Perizinan	Pajak dan			
	Kendaraan	Perizinannya			Kendaraan	Perizinannya			
	Dinas				Dinas				
	Operasional				Operasional				
	atau				atau				

	т				1	T +				1	1
	Lapangan					Lapangan					
5.5.	Pemeliharaa	Jumlah	Peralatan	60	Rp	Pemeliharaa	Jumlah	Peralatan	60	Rp	
3	n	danMesin	Lainnya	Unit	80.500.00	n	danMesin	Lainnya	Unit	40.600.00	
3			•	Omi				-	Omi		
	Peralatanda	yangDipel	lihar		0	Peralatanda	yangDipel	lihar		0	
	n Mesin					n Mesin					
	Lainnya					Lainnya					
	Lainnya					Lainnya					
5.5.	Pemeliharaa	Jumlah	Gedung	2 Unit	Rp	Pemeliharaa	Jumlah	Gedung	2	Rp	
4	n/Rehabilita	Kantor			200.000.0	n/Rehabilita	Kantor		Unit	24.590.00	
	si	dan	Bangunan		00	si	dan	Bangunan		0	
	Gedung	Lainnya				Gedung	Lainnya				
	Kantor dan	yang				Kantor dan	yang				
	Bangunan	Dipelihara	/Direhabil			Bangunan	Dipelihara	/Direhabil			
	Lainnya	itasi				Lainnya	itasi				

6	PROGRA	Persentase	PROGRA	Persentase		
	M	peningkatan	M	peningkatan		
	PENYEDI	pendampingan	PENYEDI	pendampingan		
	AAN DAN	sarana produksi	AAN DAN	sarana produksi		
	PENGEMB	pertanian utama	PENGEMB	pertanian utama		
	ANGAN	(padi dan cabai)	ANGAN	(padi dan cabai)		
	SARANA		SARANA			
	PERTANI		PERTANI			
	AN		AN			
6.1	Pengawasa	Persentase	Pengawasa	Persentase		
	n	pengawasan	n	pengawasan		
	Penggunaa	penggunaan	Penggunaa	penggunaan		
	n Sarana	sarana pertanian	n Sarana	sarana pertanian		
	Pertanian		Pertanian			

<i>c</i> 1	D	I1-1- D	20	D :-	D	I1-1- D	20	D.:	
6.1.	Pengawasan	Jumlah Pengawasan	28	Rp	Pengawasan	Jumlah Pengawasan	28	Rp	
1	Penggunaan	Penggunaan Sarana	lokasi	102.076.4	Penggunaan	Penggunaan Sarana	lokas	44.732.45	
	Sarana	Pendukung		16	Sarana	Pendukung	i	0	
	Pendukung	Pertanian			Pendukung	Pertanian			
	Pertanian	Sesuai dengan			Pertanian	Sesuai dengan			
	Sesuai	Komoditas,			Sesuai	Komoditas,			
	dengan	Teknologi dan			dengan	Teknologi dan			
	Komoditas,	Spesifik Lokasi			Komoditas,	Spesifik Lokasi			
	Teknologi				Teknologi				
	dan				dan				
	Spesifik				Spesifik				
	Lokasi				Lokasi				
6.1.	Pendamping	Jumlah	96	Rp	Pendamping	Jumlah	90	Rp	
2	an	Pendampingan	kali	968.380.1	an	Pendampingan	kali	323.903.1	
	Penggunaan	Penggunaan Sarana		22	Penggunaan	Penggunaan Sarana		20	
	Sarana	Pendukung			Sarana	Pendukung			
	Pendukung	Pertanian			Pendukung	Pertanian			
	Pertanian				Pertanian				

7	PROGRA	Persentase	PROGRA I	Persentase
	M	prasarana yang	M I	prasarana yang
	PENYEDI	digunakan	PENYEDI d	digunakan
	AAN DAN		AAN DAN	
	PENGEMB		PENGEMB	
	ANGAN		ANGAN	
	PRASARA		PRASARA	
	NA		NA	
	PERTANI		PERTANI	
	AN		AN	
7.1	Pengemban	Persentase lahan	Pengemban I	Persentase lahan
	gan	sawah yang	gan	sawah yang
	Prasarana	terdata	Prasarana t	terdata
	Pertanian		Pertanian	

7.1.	Pengelolaan	Lahan	Pertanian	12000	Rp	Pengelolaan	Lahan	Pertanian	1	Rp	
1	Lahan	Pangan		hektar	390.684.8	Lahan	Pangan		Doku	288.620.0	
	Pertanian	Berkelan	jutan/LP2B		00	Pertanian	Berkelanj	utan/LP2B	men	00	
	Pangan	,				Pangan	,				
	Berkelanjut	Kawasan	Pertanian			Berkelanjut	Kawasan	Pertanian			
	an/LP2B,	Pangan				an/LP2B,	Pangan				
	Kawasan	Berkelan	jutan/KP2			Kawasan	Berkelanj	utan/KP2			
	Pertanian	В	dan			Pertanian	В	dan			
	Pangan	Lahan	Cadangan			Pangan	Lahan	Cadangan			
	Berkelanjut	Pertanian	Pangan			Berkelanjut	Pertanian	Pangan			
	an/KP2B	Berkelan	jutan/LCP2			an/KP2B	Berkelanj	utan/LCP2			
	dan	В	yang			dan	В	yang			
	Lahan	Dikelola				Lahan	Dikelola				
	Cadangan					Cadangan					
	Pertanian					Pertanian					
	Pangan					Pangan					
	Berkelanjut					Berkelanjut					
	an/LCP2B					an/LCP2B					

7.1.	Koordinasi	Jumlah Koordinasi	5 kali	Rp	Koordinasi	Jumlah Koordinasi	5 kali	Rp
.2	dan	dan		226.270.0	dan	dan		98.076.00
	Sinkronisasi	Sinkronisasi		00	Sinkronisasi	Sinkronisasi		0
	Prasarana	Prasarana			Prasarana	Prasarana		
	Pendukung	Pendukung			Pendukung	Pendukung		
	Pertanian	Pertanian			Pertanian	Pertanian		
	Lainnya	Lainnya			Lainnya	Lainnya		
7.2	Pembangu	Persentase luas			Pembangu	Persentase luas		
	nan	sawah yang terairi			nan	sawah yang terairi		
	Prasarana				Prasarana			
	Pertanian				Pertanian			
7.2.	Pembangun	Jumlah Jaringan	5 Unit	Rp	Pembangun	Jumlah Jaringan	3	Rp
1	an,	Irigasi		481.289.6	an,	Irigasi	Unit	113.602.1
	Rehabilitasi	Usaha Tani yang		00	Rehabilitasi	Usaha Tani yang		00
	dan	Dibangun,			dan	Dibangun,		
	Pemeliharaa	Direhabilitasi ,			Pemeliharaa	Direhabilitasi ,		
	n Jaringan	dan Dipelihara			n Jaringan	dan Dipelihara		
	Irigasi				Irigasi			
	Usaha Tani				Usaha Tani			

7.2.	Pembangun	Jumlah Embung	2 Unit	Rp	Pembangun	Jumlah Embung		Rp
			2 Omi	-				
2	an,	Pertanian		576.112.5	an,	Pertanian		-
	Rehabilitasi	yang Dibangun,		00	Rehabilitasi	yang Dibangun,		
	dan	Direhabilitasi dan			dan	Direhabilitasi dan		
	Pemeliharaa	Dipelihara			Pemeliharaa	Dipelihara		
	n Embung				n Embung			
	Pertanian				Pertanian			
7.2.	Pembangun	Jalan Usaha Tani	2 Unit	Rp	Pembangun	Jalan Usaha Tani	4	Rp
3	an,	yang		568.536.6	an,	yang	Unit	1.000.000.
	Rehabilitasi	Dibangun,		50	Rehabilitasi	Dibangun,		000
	dan	Direhabilitasi			dan	Direhabilitasi		
	Pemeliharaa	dan Dipelihara			Pemeliharaa	dan Dipelihara		
	n Jalan				n Jalan			
	Usaha Tani				Usaha Tani			
7.2.	Pembangun	Jumlah DAM Parit	5 Unit	Rp	Pembangun	Jumlah DAM Parit		Rp
4	an,	yang		600.000.0	an,	yang		-
	Rehabilitasi	Dibangun,		00	Rehabilitasi	Dibangun,		
	dan	Direhabilitasi			dan	Direhabilitasi		
	Pemeliharaa	dan Dipelihara			Pemeliharaa	dan Dipelihara		

	n DAM				n DAM			
	Parit				Parit			
								.
7.2.	Pembangun	Jumlah Balai	5 Unit	Rp	Pembangun	Jumlah Balai	Rp	
5	an,	Penyuluh di		600.000.0	an,	Penyuluh di	-	,
	Rehabilitasi	Kecamatan serta		00	Rehabilitasi	Kecamatan serta		
	dan	Sarana			dan	Sarana		
	Pemeliharaa	Pendukungnya yang			Pemeliharaa	Pendukungnya yang		,
	n Balai	Dibangun,			n Balai	Dibangun,		
	Penyuluh di	Direhabilitasi			Penyuluh di	Direhabilitasi		
	Kecamatan	dan Dipelihara			Kecamatan	dan Dipelihara		
	serta Sarana				serta Sarana			
	Pendukungn				Pendukungn			
	ya				ya			

7.0	D 1	T 11 D	· ·	Ъ	D 1	T 11 D 2 D	
7.2.	Pembangun	Jumlah Prasarana	6 unit	Rp	Pembangun	Jumlah Prasarana 3 Rp	
6	an,	Pertanian Lainnya		1.000.000.	an,	Pertanian Lainnya Unit 1.929.023.	
	Rehabilitasi	yang		000	Rehabilitasi	yang 500	
	dan	Dibangun,			dan	Dibangun,	
	Pemeliharaa	Direhabilitasi			Pemeliharaa	Direhabilitasi	
	n	dan Dipelihara			n	dan Dipelihara	
	Prasarana				Prasarana		
	Pertanian				Pertanian		
	Lainnya				Lainnya		
8	PROGRA	Persentase Luas			PROGRA	Persentase Luas	
	M	lahan yang terkena			M	lahan yang terkena	
	PENGEND	bencana			PENGEND	bencana	
	ALIAN				ALIAN		
	DAN				DAN		
	PENANGG				PENANGG		
	ULANGAN				ULANGAN		
	BENCANA				BENCANA		
	PERTANI				PERTANI		
	AN				AN		

8.1	Pengendali	Persentase			Pengendali	Persentase			
	an dan	pengendalian dan			an dan	pengendalian dan			
	Penanggula	penanggulangan			Penanggula	penanggulangan			
	ngan	bencana pertanian			ngan	bencana pertanian			
	Bencana				Bencana				
	Pertanian				Pertanian				
	Kabupaten/				Kabupaten/				
	Kota				Kota				
8.1.	Pengendalia	Jumlah Luas	2000	Rp	Pengendalia	Jumlah Luas	1700	Rp	
1	n	Serangan	ha	130.000.0	n	Serangan	ha	276.450.5	
	Organisme	Organisme		00	Organisme	Organisme		00	
	Pengganggu	Pengganggu			Pengganggu	Pengganggu			
	Tumbuhan	Tumbuhan (OPT)			Tumbuhan	Tumbuhan (OPT)			
	(OPT)	Tanaman Pangan,			(OPT)	Tanaman Pangan,			
	Tanaman	Hortikultura, dan			Tanaman	Hortikultura, dan			
	Pangan,	Perkebunan yang			Pangan,	Perkebunan yang			
	Hortikultura	Dikendalikan			Hortikultura	Dikendalikan			
	, dan				, dan				
	Perkebunan				Perkebunan				

8.1.	Penanggula	Jumlah	1000	Rp	Penanggula	Jumlah	1000	Rp	
2	ngan Pasca	Penanggulangan	ha	23.940.00	ngan Pasca	Penanggulangan	ha	23.900.00	
	Bencana	Pasca Bencana		0	Bencana	Pasca Bencana		0	
	Alam	Alam			Alam	Alam			
	Bidang	Bidang Tanaman			Bidang	Bidang Tanaman			
	Tanaman	Pangan,			Tanaman	Pangan,			
	Pangan,	Hortikultura,			Pangan,	Hortikultura,			
	Hortikultura	Perkebunan,			Hortikultura	Perkebunan,			
	,	Peternakan dan			,	Peternakan dan			
	Perkebunan,	Kesehatan Hewan			Perkebunan,	Kesehatan Hewan			
	Peternakan				Peternakan				
	dan				dan				
	Kesehatan				Kesehatan				
	Hewan				Hewan				
9	PROGRA	Persentase			PROGRA	Persentase			
	M	peningkatan			M	peningkatan			
	PENYULU	kapasitas			PENYULU	kapasitas			
	HAN	kelembagaan			HAN	kelembagaan			
	PERTANI	penyuluhan			PERTANI	penyuluhan			

	AN				AN				
9.1	Pelaksanaa	Persentase			Pelaksanaa	Persentase			
	n	pelaksanaan			n	pelaksanaan			
	Penyuluha	penyuluhan			Penyuluha	penyuluhan			
	n Pertanian	pertanian			n Pertanian	pertanian			
9.1.	Peningkatan	Jumlah	50	Rp	Peningkatan	Jumlah	50	Rp	
1	Kapasitas	Kelembagaan	orang	43.500.00	Kapasitas	Kelembagaan	orang	352.735.0	
	Kelembagaa	Penyuluhan		0	Kelembagaa	Penyuluhan		00	
	n	Pertanian di			n	Pertanian di			
	Penyuluhan	Kecamatan dan			Penyuluhan	Kecamatan dan			
	Pertanian di	Desa			Pertanian di	Desa			
	Kecamatan	yang Ditingkatkan			Kecamatan	yang Ditingkatkan			
	dan Desa	Kapasitasnya			dan Desa	Kapasitasnya			

9.1.	Pengemban	Jumlah	200	Dn	Dongombon	Jumlah	200	Dn	
9.1.	rengemban	Juilliali	200	Rp	Pengemban	Juilliali	∠00	Rp	
2	gan	Kelembagaan	kelom	149.700.0	gan	Kelembagaan	kelo	575.200.0	
	Kapasitas	Petani di Kecamatan	pok	00	Kapasitas	Petani di Kecamatan	mpok	00	
	Kelembagaa	dan			Kelembagaa	dan			
	n Petani di	Desa yang			n Petani di	Desa yang			
	Kecamatan	Ditingkatkan			Kecamatan	Ditingkatkan			
	dan Desa	Kapasitasnya			dan Desa	Kapasitasnya			
9.1.	Penyediaan	Jumlah Sarana dan	28	Rp	Penyediaan	Jumlah Sarana dan	28	Rp	
3	dan	Prasarana	BPP	381.900.0	dan	Prasarana	BPP	1.134.066.	
	Pemanfaata	Penyuluhan		00	Pemanfaata	Penyuluhan		000	
	n Sarana	Pertanian			n Sarana	Pertanian			
	dan				dan				
	Prasarana				Prasarana				
	Penyuluhan				Penyuluhan				
	Pertanian				Pertanian				

9.1.	Pembentuka	Jumlah Sekolah	-	Rp	Pembentuka	Jumlah	Sekolah	24	Rp	
4	n dan	Lapang		-	n dan	Lapang		kali	456.647.0	
	Penyelengg	Kelompok Tani			Penyelengg	Kelompok	Tani		00	
	araan	yang			araan	yang				
	Sekolah	Terbentuk dan			Sekolah	Terbentuk	dan			
	Lapang	Beroperasi			Lapang	Beroperasi				
	Kelompok				Kelompok					
	Tani				Tani					
	Tingkat				Tingkat					
	Kabupaten/				Kabupaten/					
	Kota				Kota					
	TOTAL	-1		Rp					Rp	
				46.297.82					37.442.44	
				3.005					0.659	

# 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (berupa proposal) maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pelaksanaan musrenbangtan, hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Namun demikian dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada table T-C.32. Dari table tersebut kita peroleh data bahwa usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk tahun 2024 ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (P2L). Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bantuan dalam pembangunan kebun bibit, demplot dan pakarangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 2 lokasi yaitu kecamatan Putra Rumbia dan Anak Ratu Aji. Kegiatan kedua yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasaranan pertanian lainnya. Kegiatan ini akan dilakukan di Kecamatan Seputih Surabaya, Bekri, dan Kota Gajah dengan jumlah volume 5 unit.

# T`-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

N	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Catatan
0			Kinerja	Volume	
1	Penyediaan dan Pengembangan	Putra Rumbia, Anak	Terlaksananya peningkatan	2 Unit	
	Sarana Pertanian (P2L)	Ratu Aji	pendampingan sarana produksi		
			pertanian utama		
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Seputih	Jumlah prasarana pertanian	5 Unit	
	Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Surabaya,Bekri,Kota	lainnya yang		
	Lainnya	Gajah	dibangun,direhabilitasi dan		
			dipelihara		
3	Pembangunan, rehabilitasi dan	Trimurjo,Gunung	Jumlah jaringan irigasi usaha	2 Unit	
	Pemeliharaan Prasarana Jaringan	Sugih	tani yang		
	Irigasi Usaha Tani		dibangun,direhabilitasi dan		
			dipelihara		
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Bekri, Anak	Jalan usaha tani yang	10 Unit	
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tuha,Padangratu,Ko	dibangun,direhabilitasi dan		
		ta Gajah,Seputih	dipelihara		
		Surabaya,Bumi Ratu			
		Nuban,Trimurjo			

	5	Pengembangan Kapasitas	Bumi	Terbentuknya Kebun Kolektif	46	Bumi Nabung (10
		Kelembagaan Petani di Kecamatan	Nabung,Seputih	di 39 KWT, Meningkatnya	Paket/Kelom	Klp), Sept.Surabaya
		dan Desa	Surabaya,Anak Ratu	Produksi Padi di 8 Kelompok	pok di 8	(1 Klp), Anak Ratu
			Aji,Bandar	Tani Penerima Bantuan,	Kecamatan	Aji (10 Klp), Bdr
			Surabaya, Terbanggi	Meningkatkan Kesejahteraan		Surabaya (9
			Besar, Trimurjo, Bum	Kelompok Tani Penerima		Klp),Terb.Besar (1
			i Ratu	Bantuan di Kampung Sendang		Klp) Trimurjo (5
			Nuban,Sendang	Asih Kecamatan Sendang		Klp),Bumi Ratu
			Agung	Agung		Nuban (3 Klp)
						,Sendang Agung (7
						Klp)
	6	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana	BPP Terbanggi	Tersedianya sarana dan	2 Paket	Belanja
		dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Besar, BPP Seputih	prasarana pendukung BPP		Alat/Bahan,Belanja
		(DAK)	Banyak			Jasa
						Konsultasi,Belanja
						Modal
1					ĺ	

Kegiatan ketiga yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi usaha tani dengan jumlah jaringan irigasi usaha tani yang akan dilakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sebanyak 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Trimurjo dan Gunung Sugih. Kegiatan Keempat yaitu Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan jumlah jalan usaha tani yang akan dibangun, direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 10 unit yang berlokasi di Kecamatan Bekri, Anak Tuha, Padang Ratu, Kota Gajah, Seputih Surabaya, Bumi Ratu Nuban, dan Trimurjo. Kegiatan kelima yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Kegiatan ini memiliki volume 46 paket yang akan dibagikan di Kecamatan Bumi Nabung, Seputih Surabaya, Anak Ratu Aji, Bandar Surabaya, Terbanggi Besar, Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, dan Sendang Agung. Kegiatan Keenam yaitu penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang akan dilakukan di BPP Terbanggi Besar dan BPP Seputih Banyak.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, (2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional, (3) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional, (4) Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian, (5) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan, (6) Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Tanaman serta Penyakit Pada Hewan, (7) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, (8) Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima, serta (9) Terselenggaranya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan perluasan petani,(5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatanjaringan pasar produk pertanian, (8) penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (9) peningkatan dukungan perkarantinaan, (10) peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (11) pelayanan informasi publik, (13) pengelolaan regulasi, (14) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, (15) pengelolaan perencanaan, (16) penataan dan penguatan organisasi, (17) Pengelolaan sistem pengawasan.

#### Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus dipedomani oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi Kementerian Pertanian. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan.
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta.
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
- 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah: Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakanfaktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2020-2024 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman

Halaman 108

pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.

- Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- 3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2026).

Telaah renstra Kementerian Pertanian RI menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah telah sejalan dengan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung. Permasalahan yang teridentifikasi dari telaahan ini adalah adanya perbedaan struktur organisasi unit kerja yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, secara umum permasalahan yang teridentifikasi dari telaah renstra Kementerian Pertanian RI dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
- 2. Adanya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat
- 3. Ketidakstabilan perekonomian nasional

# 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan target pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya dan bersifat kuantitatif (terukur). Sedangkan pencapaian target ini merupakan ukuran penilaian keberhasilan dari hasil kinerja faktor kunci keberhasilan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 8. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Tahun 2023

N	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA
0.			KINERJA	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menjaga Ketersediaan Pangan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	385,87	391,65
2	Terwujudnya Kontribusi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	a. Meningkatn ya Produksi komoditas utama pangan (Padi)	Jumlah Produksi Komoditas Utama Pangan (Padi) ton	602,591	606,135
		b. Meningkatn ya Produksi Komoditas Utama Horti (Cabai)	Jumlah Produksi Komoditas Utama pangan (Cabai) ton	4,112	4,153
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	В	В

Halaman 110

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA
		KINERJA	2021	2022
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perangkat Daerah			
Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan Pemerintah	Meningkatnya fasilitasi penunjang kesekretariatan	Nilai	79	80
	(2)  Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan	(2) (3)  Perangkat Daerah  Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan  Meningkatnya fasilitasi	TUJUAN SASARAN KINERJA  (2) (3) (4)  Perangkat Daerah  Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan Pemerintah Pemerintah  SASARAN KINERJA  Nilai	TUJUAN SASARAN KINERJA 2021  (2) (3) (4) (5)  Perangkat Daerah  Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan Pemerintah  Nilai 79 fasilitasi penunjang

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka seluruh nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melaksanakan proses "pemetaan" sebagaimana telah diatur dalam Kepmendagri tersebut.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tahun 2023 akan melaksanakan 9 (sembilan) Program terdiri dari 17 (tujuh belas) subkegiatan dan 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.442.440.659. Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan tertuang dalam Tabel T-C.33 Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 *Halaman 111* 

Kabupaten Lampung Tengah.Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun penyebaran lokasi sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya tersebar merata keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan terfokus pada Gapoktan, kelompok tani, dan kelompok wanita tani.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

K	OD	E	Urusan/ Bidang	Indikator		Rencana T	<b>Sahun 2024</b>		Cata	Prakiraa	n Maju
			Urusan/	Program/Keg					tan	Rencana	Tahun
			Program/	iatan /Sub					Pent	2025	
			Kegiatan/ Sub	Kegiatan	Lokasi	Target	Kebutuha	Sumber	ing	Target	Kebutuha
			Kegiatan			Capaia	n	Dana			n
						n	Dana/Pagu				Dana/Pag
						Kinerja	Indikatif				u
											Indikatif
2			URUSAN PEMER	RINTAHAN WA	JIB YANG T	IDAK BEI	RKAITAN DI	ENGAN PI	ELAYA	NAN DA	SAR
2	9		URUSAN PEMER	RINTAHAN BID	ANG PANGA	N					
2	0	2	PROGRAM	Persentase	Kab	90%		Dana		95%	
	9		PENGELOLAA	Kampung	Lampung		3.162.000.	Alokasi			4.480.756.
			N SUMBER	yang telah	Tengah		000	Khusus			000
			DAYA	memiliki				(DAK)			
			EKONOMI	lumbung				dan			
			UNTUK	pangan				Dana			
			KEDAULATAN	masyarakat				Alokasi			
			DAN								

					KEMANDIRIA N PANGAN					Umum (DAU)		
2	2 0	2	2.		Penyediaan	Jumlah	Kab	90%		Dana	95%	
	9		01		Infrastruktur	Infrastruktur	Lampung		3.162.000.	Alokasi		4.480.756.
					dan Seluruh	pergudangan	Tengah		000	Khusus		000
					Pendukung	dan sarana				(DAK)		
					Kemandirian	pendukung				dan		
					Pangan sesuai	lainnya untuk				Dana		
					Kewenangan	penyimpanan				Alokasi		
					Daerah	cadangan				Umum		
					Kabupaten/Kota	pangan yang				(DAU)		
						disediakan						
2	2 0	2	2.	1	Penyediaan	Jumlah	Kab	3		Dana	4	
	9		01		Infrastruktur	Lumbung	Lampung		3.000.000.	Alokasi		4.000.000.
					Lumbung Pangan	Pangan yang	Tengah		000	Khusus		000
						Tersedia				(DAK)		

2	2 0	2	2.	3	Penyediaan	Jumlah	Kab	12	162.000.00	Dana	14	480.756.0
	9		01		Infrastruktur	Infrastruktur	Lampung	Kecama	0	Alokasi	Kecama	00
					Pendukung	Pendukung	Tengah	tan		Umum(	tan	
					Kemandirian	Kemandirian				DAU)		
					Pangan Lainnya	Pangan yang						
						Tersedia						
2	2 9	0			PROGRAM	Rasio	Kab			Dana		
		3			PENINGKATA	cadangan	Lampung		1.453.900.	Alokasi		1.830.600.
					N	pangan	Tengah		000	Umum(		000
					DIVERSIFIKAS	masyarakat				DAU)		
					I DAN	terhadap						
					KETAHANAN	kebutuhan						
					PANGAN	pangan						
					MASYARAKAT	(beras)						

2	9	0	2.		Penyediaan dan	Persentase	Kab			Dana		
		3	01		Penyaluran	penyediaan	Lampung	-	542.900.00	Alokasi		790.000.0
					Pangan Pokok	dan	Tengah		0	Umum(		00
					atau Pangan	penyaluran				DAU)		
					Lainnya sesuai	pangan						
					dengan	pokok atau						
					Kebutuhan	pangan						
					Daerah	lainnya sesuai						
					Kabupaten/Kota	dengan						
					dalam rangka	kebutuhan						
					Stabilisasi	daerah						
					Pasokan dan							
					Harga Pangan							
2	9	0	2.	0	Penyediaan	Informasi	Kab	1		Dana	1	
		3	01	1	Informasi Harga	Harga	Lampung	dokume	69.000.000	Alokasi	dokume	255.000.0
					Pangan dan	Pangan dan	Tengah	n		Umum(	n	00
					Neraca Bahan	Neraca				DAU)		
					Makanan	Bahan						
						Makanan						

2	9	0	2.	0	Penyediaan	Pangan	Kab	7		Dana	8	
		3	01	2	Pangan Berbasis	Berbasis	Lampung	Kecama	135.000.00	Alokasi	Kecama	155.000.0
					Sumber Daya	Sumber Daya	Tengah	tan	0	Umum(	tan	00
					Lokal	Lokal				DAU)		
						yangTersedia						
2	9	0	2.	0	Koordinasi,	Jumlah	Kab	5 kali		Dana	7 kali	
		3	01	3	Sinkronisasi dan	Koordinasi,	Lampung		62.000.000	Alokasi		72.500.00
					Pelaksanaan	Sinkronisasi	Tengah			Umum(		0
					Distribusi Pangan	dan				DAU)		
					Pokok dan Pangan	Pelaksanaan						
					Lainnya	Distribusi						
						Pangan						
						Pokok dan						
						Pangan						
						Lainnya						
2	9	0	2.	0	Pemantauan Stok,	Pemantauan	Kab	15		Dana	15	
		3	01	4	Pasokan dan	Stok, Pasokan	Lampung	lokasi	95.000.000	Alokasi	lokasi	105.000.0
					Harga Pangan	dan Harga	Tengah			Umum(		00
						Pangan				DAU)		

2	9	0	2.	0	Pengembangan	Jumlah	Kab	40		Dana	45	
		3	01	5	Kelembagaan dan	Kelembagaan	Lampung	orang	120.000.00	Alokasi	orang	130.500.0
					Jaringan	dan Jaringan	Tengah		0	Umum(		00
					Distribusi Pangan	Distribusi				DAU)		
						Pangan yang						
						Dikembangka						
						n						
2	9	0	2.	0	Pengembangan	Jumlah	Kab	3 unit		Dana	4 paket	
		3	01	6	Kelembagaan	Kelembagaan	Lampung		61.900.000	Alokasi		72.000.00
					Usaha Pangan	Usaha Pangan	Tengah			Umum(		0
					Masyarakat dan	Masyarakat				DAU)		
					Toko Tani	dan Toko Tani						
					Indonesia	Indonesia						
						yang						
						Dikembangka						
						n						
2	9	0	2.		Pengelolaan dan	Jumlah CCP	Kab			Dana		
		3	02		Keseimbangan	(Cadangan	Lampung	-	304.000.00	Alokasi		342.000.0
					Cadangan	Pangan	Tengah		0			00

					Pangan	Pemerintah)				Umum(		
					Kabupaten/Kota	yang				DAU)		
						disediakan						
						(Beras)						
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan	Jumlah	Kab	7 kali		Dana	12 kali	
		3	02	1	Sinkronisasi	Koordinasi	Lampung		81.000.000	Alokasi		84.500.00
					Pengendalian	dan	Tengah			Umum(		0
					Cadangan Pangan	Sinkronisasi				DAU)		
					Kabupaten/Kota	Pengendalian						
						Cadangan						
						Pangan						
						Kabupaten/Ko						
						ta						
2	9	0	2.	0	Penyusunan	jumlah	Kab	14 kali		Dana	14 kali	
		3	02	2	Rencana	rencana	Lampung		93.000.000	Alokasi		107.500.0
					Kebutuhan	kebutuhan	Tengah			Umum(		00
					Pangan Lokal	pangan lokal				DAU)		
						yang disusun						

2	9	0	2.	0	Pengadaan	Jumlah	Kab	30 ton		Dana	30 ton	
		3	02	3	Cadangan Pangan	Cadangan	Lampung		130.000.00	Alokasi		150.000.0
					Pemerintah	Pangan	Tengah		0	Umum(		00
					Kabupaten/Kota	Pemerintah				DAU)		
						Kabupaten/Ko						
						ta						
2	9	0	2.		Penentuan	Persentase	Kab	8 kali		Dana		
		3	03		Harga Minimum	penentuan	Lampung		198.500.00	Alokasi		210.800.0
					Daerah untuk	Harga	Tengah		0	Umum(		00
					Pangan Lokal	Minimum				DAU)		
					yang Tidak	Daerah						
					Ditetapkan oleh	pangan Lokal						
					Pemerintah							
					Pusat dan							
					Pemerintah							
					Provinsi							
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan	Jumlah	Kab	8 kali		Dana	14 kali	
		3	03	1	Sinkronisasi	Koordinasi	Lampung		198.500.00	Alokasi		210.800.0
					Penentuan Harga	dan	Tengah		0			00

					Minimum Pangan	Sinkronisasi				Umum(		
					Pokok Lokal	Penentuan				DAU)		
						Harga						
						Minimum						
						Pangan Pokok						
						Lokal						
2	9	0	2.		Pelaksanaan	Persentase	Kab			Dana		
		3	04		Pencapaian	pelaksanaan	Lampung	-	408.500.00	Alokasi		487.800.0
					Target Konsumsi	Target	Tengah		0	Umum(		00
					Pangan	Konsumsi				DAU)		
					Perkapita/Tahun	pangan						
					sesuai dengan	perkapita						
					Angka	pertahun						
					Kecukupan Gizi							
2	9	0	2.	0	Penyusunan dan	Target	Kab	1		Dana	1	
		3	04	1	Penetapan Target	Konsumsi	Lampung	dokume	192.000.00	Alokasi	dokume	215.700.0
					Konsumsi Pangan	Pangan Per	Tengah	n	0	Umum(	n	00
					per Kapita per	Kapita Per				DAU)		
					Tahun	Tahun						

2	9	0	2.	0	Pemberdayaan	Jumlah	Kab	3		Dana	4	
		3	04	2	Masyarakat dalam	Pemberdayaan	Lampung	kelomp	125.000.00	Alokasi	kelomp	157.600.0
					Penganekaragama	Kelompok	Tengah	ok	0	Umum(	ok	00
					n Konsumsi	Masyarakat				DAU)		
					Pangan Berbasis	dalam						
					Sumber Daya	Penganekaraga						
					Lokal	man Konsumsi						
						Pangan						
						Berbasis						
						Sumber Daya						
						Lokal						
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan	Jumlah	Kab	10 kali		Dana	12 kali	
		3	04	3	Sinkronisasi	Koordinasi	Lampung		91.500.000	Alokasi		114.500.0
					Pemantauan dan	dan	Tengah			Umum(		00
					Evaluasi	Sinkronisasi				DAU)		
					Konsumsi per	Pemantauan						
					Kapita per Tahun	dan Evaluasi						
						Konsumsi Per						

						Kapita Per						
						Tahun						
2	9	0			PROGRAM	Persentase	Kab	100%		Dana		
		4			PENANGANAN	daerah	Lampung		130.000.00	Alokasi		150.750.0
					KERAWANAN	rentan rawan	Tengah		0	Umum(		00
					PANGAN	pangan				DAU)		
2	9	0	2.		Penyusunan Peta	Jumlah Peta	Kab	1		Dana		
		4	01		Kerentanan dan	Ketahanan	Lampung	dokum	45.000.000	Alokasi		60.000.00
					Ketahanan	Pangan dan	Tengah	en		Umum(		0
					Pangan	Kerentanan				DAU)		
					Kecamatan	Pangan yang						
						disusun						
2	9	0	2.	0	Penyusunan,	Peta dan	Kab	1		Dana	1	
		4	01	1	Pemutakhiran dan	Analisis	Lampung	dokume	45.000.000	Alokasi	dokume	60.000.00
					Analisis Peta	Ketahanan	Tengah	n		Umum(	n	0
					Ketahanan dan	dan				DAU)		
					Kerentanan	Kerentanan						
					Pangan							

						Pangan yang Dimutahirkan						
2	9	0	2.		Penanganan	Jumlah	Kab	10 kali	0= 000 000	Dana		
		4	02		Kerawanan	Kampung	Lampung		85.000.000	Alokasi		90.750.00
					Pangan	Rentan	Tengah			Umum(		0
					Kewenangan	Rawan				DAU)		
					Kabupaten/Kota	Pangan yang						
						ditangani						
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan	Jumlah	Kab	10 kali		Dana	12 kalo	
		4	02	1	Sinkronisasi	Koordinasi	Lampung		85.000.000	Alokasi		90.750.00
					Penanganan	dan	Tengah			Umum(		0
					Kerawanan	Sinkronisasi				DAU)		
					Pangan	Penanganan						
					Kabupaten/Kota	Kerawanan						
						Pangan						
						Kabupaten/Ko						
						ta						

2	9	0		PROGRAM	Jumlah	Kab			Dana	
		5		PENGAWAS	AN Kampung	Lampung	-	184.500.00	Alokasi	216.900.0
				KEAMANAN	Rentan	Tengah		0	Umum(	00
				PANGAN	Rawan				DAU)	
					Pangan yang					
					mendapat					
					penyaluran					
					pangan					
					pokok dan					
					pangan					
					lainnya					
2	9	0	2.	Pelaksanaan	Persentase	Kab			Dana	
		5	01	Pengawasan	pangan segar	Lampung	-	184.500.00	Alokasi	216.900.0
				Keamanan	asal	Tengah		0	Umum(	00
				Pangan Segar	tumbuhan				DAU)	
				Daerah	yang					
				Kabupaten/K	ota memenuhi					
					persyaratan					
					mutu dan					

						keamanan						
						pangan						
2	9	0	2.	0	Penguatan	Kelembagaan	Kab	10		Dana	12	
		5	01	1	Kelembagaan	Keamanan	Lampung	kelomp	42.500.000	Alokasi	kelomp	45.000.00
					Keamanan	Pangan Segar	Tengah	ok		Umum(	ok	0
					Pangan Segar	Daerah				DAU)		
					Daerah	Kabupaten/Ko						
					Kabupaten/Kota	ta yang Dibina						
2	9	0	2.	0	Sertifikasi	Jumlah	Kab	12		Dana	12	
		5	01	2	Keamanan	Sertifikasi	Lampung	kecamat	52.000.000	Alokasi	kecamat	65.400.00
					Pangan Segar	Keamanan	Tengah	an		Umum(	an	0
					Asal Tumbuhan	Pangan Segar				DAU)		
					Daerah	Asal						
					Kabupaten/Kota	Tumbuhan						
						Daerah						

						Kabupaten/Ko						
						ta						
2	9	0	2.	0	Penyediaan	Jumlah Sarana	Kab	10		Dana	12	
		5	01	3	Sarana dan	dan Prasarana	Lampung	lokasi	90.000.000	Alokasi	lokasi	106.500.0
					Prasarana	Pengujian	Tengah			Umum(		00
					Pengujian Mutu	Mutu dan				DAU)		
					dan Keamanan	Keamanan						
					Pangan Segar	Pangan Segar						
					Asal Tumbuhan	Asal						
					Daerah	Tumbuhan						
					Kabupaten/Kota	Daerah						
						Kabupaten/Ko						
						ta						
3					Urusan Pilihan							

3	2			Pertanian					
	7								
3	2			Program	Meningkatny				
	7			Penunjang	a Persentase				
				Urusan	Ketersediaan				
				Pemerintahan	Penunjnag				
				Daerah	Urusan				
				Kabupaten/Kota	Pemerintahan				
					Daerah di				
					OPD				
3	2	0		PROGRAM			412.956.76		968.680.1
	7	2		PENYEDIAAN			4		22
				DAN					
				PENGEMBANG					
				AN SARANA					
				PERTANIAN					
3	2	0	2.	Pengawasan			412.956.76		968.680.1
	7	2	01	Penggunaan			4		22

					Sarana							
					Pertanian							
3	2	0	2.	0	Pengawasan	Jumlah	28	12	59.072.000	APBD	28	300.000
	7	3	01	1	Penggunaan	Pengawasan	Kecamatan	laporan				
					Sarana	Penggunaan						
					Pendukung	Sarana						
					Pertanian Sesuai	Pendukung						
					dengan	Pertanian						
					Komoditas,	Sesuai dengan						
					Teknologi dan	Komoditas,						
					Spesifik Lokasi	Teknologi dan						
						Spesifik						
						Lokasi						
3	2	0	2.	0	Pendampingan	Jumlah	28	90 kali	353.884.76	APBD	96 kali	968.380.1
	7	4	01	2	Penggunaan	Pendampingan	Kecamatan		4			22
					Sarana	Penggunaan						
					Pendukung	SaranaPenduk						
					Pertanian	ung Pertanian						

3	2	0			PROGRAM							
	7	3			PENYEDIAAN				5.390.430.			4.478.244.
					DAN				000			400
					PENGEMBANG							
					AN							
					PRASARANA							
					PERTANIAN							
3	2	0	01		Pengembangan							
	7	3			Prasarana				775.840.00			616.954.8
					Pertanian				0			00
3	2	0	01	0	Pengelolaan	Lahan	Anak ratu	1		APBD	######	
	7	3		1	Lahan	Pertanian	aji, Anak	dokume	290.000.00			390.684.8
					Pertanian	Pangan	tuha,Bangu	n	0			00
					Pangan	Berkelanjutan/	n					
					Berkelanjutan/LP	LP2B,	rejo,Bekri,P					
					2B, Kawasan	Kawasan	adang					
					Pertanian Pangan	Pertanian	ratu,Pubian,					
					Berkelanjutan/KP	Pangan	Selagai					
					2B dan	Berkelanjutan/	lingga,Sepu					

					Lahan	KP2B dan	tih					
					Cadangan	Lahan	agung,Send					
					Pertanian Pangan	Cadangan	ang agung					
					Berkelanjutan/LC	Pertanian						
					P2B	Pangan						
						Berkelanjutan/						
						LCP2B yang						
						Dikelola (						
						satuan						
						Dokumen)						
3	2	0	01	0	Penyusunan	Peta	Kabupaten	1		APBN	-	
	7	3		2	Peta Lahan	Lahan	Lampung	dokume	380.000.00			-
					Pertanian	Pertanian	Tengah	n	0			
					Pangan	Pangan						
					Berkelanjutan/LP	Berkelanjutan/						
					2B	LP2B						

3	2	0	01	0	Koordinasi	Jumlah	Kabupaten	20		APBD	5 kali	
	7	3		3	dan	Koordinasi	Lampung	laporan	105.840.00			226.270.0
					Sinkronisasi	dan	Tengah		0			00
					Prasarana	sinkronisasi						
					Pendukung	prasarana						
					Pertanian lainnya	pendukung						
						pertanian						
						lainnya						
3	2	0	02		Pembangunan							
	7	3			Prasarana				4.614.590.			3.861.289.
					Pertanian				000			600
3	2	0	02	0	Pembangunan,	Jumlah	Seputih	5 unit		DAK,	5 unit	481.289.6
	7	3		1	Rehabilitasi dan	Jaringan	banyak,		124.600.00	APBN		00
					Pemeliharaan	Irigasi Usaha	Anak ratu		0			
					Jaringan Irigasi	Tani yang	aji, Padang					
					Usaha Tani	Dibangun,	ratu					
						Direhabilitasi,						
						dan Dipelihara						

3	2	0	02	0	Pembangunan,	Jumlah	Seputih	1 unit		DAK,	1	1 unit	
	7	3		2	Rehabilitasi dan	Embung	agung,		370.210.00	APBN			120.000.0
					Pemeliharaan	Pertanian	Seputih		0				00
					Embung Pertanian	yang	Raman,						
						Dibangun,	Seputih						
						Direhabilitasi	Mataram						
						dan Dipelihara							
3	2	0	02	0	Pembangunan,	Jalan Usaha	Padang	7		DAK,	3	3 unit	
	7	3		3	Rehabilitasi dan	Tani yang	ratu,		1.400.000.				300.000.0
					Pemeliharaan	Dibangun,	Selagai		000				00
					Jalan Usaha Tani	Direhabilitasi	lingga						
						dan Dipelihara							
3	2	0	02	0	Pembangunan,	Jumlah DAM	Padang	1 unit		DAK	1	l unit	
	7	3		4	Rehabilitasi dan	Parit yang	Ratu.		619.780.00				120.000.0
					Pemeliharaan	Dibangun,			0				00
					DAM Parit	Direhabilitasi							
						dan Dipelihara							

3	2	0	02	0	Pembangunan,	Jumlah	Seputih	5 unit		APBD	5 unit	
	7	3		5	Rehabilitasi dan	Long	raman,		2.100.000.			440.000.0
					Pemeliharaan	Storage	Seputih		000			00
					Prasarana	yang	Mataram,B					
					Pertanian Lainnya	Dibangun,	andar					
						Direhabilitasi	surabaya,B					
						dan Dipelihara	ekri, Anak					
							ratu aji					
3	2	0	02	0	Pembangunan,	Jumlah Balai	BPP	3 BPP	0	DAK,	4 BPP	
	7	3		8	Rehabilitasi dan	Penyuluh di	Punggur,			APBN		2.400.000.
					Pemeliharanaan	Kecamatan	BPP					000
					Balai Penyuluh di	sertaSarana	Seputih					
					Kecamatan serta	Pendukungnya	Banyak &					
					sarana	yang	BPP					
					pendukungnya	Dibangun,	Bandar					
						Direhabilitasi	Mataram					
						dan Dipelihara						

3	2	0			Program	Persentase				
	7	5			Pengendalian	fasilitasi		308.940.00		
					Dan	penanganggul		0		
					Penanggulangan	angan				
					Bencana	bencana				
					Pertanian					
3	2	0	2	1	Pengendalian	Persentase				
	7	5			dan	pengendalian		308.940.00		
					Penanggulangan	dan		0		
					Bencana	penanggulang				
					Pertanian	an bencana				
					Kabupaten/Kota	pertanian				

3	2	0	01	0	Pengendalian	Jumlah Luas	kecamatan	1700 ha		APBD	2000 ha	
	7	5		1	Organisme	Serangan			285.000.00			96.250.00
					Pengganggu	Organisme			0			0
					Tumbuhan	Pengganggu						
					Tanaman Pangan,	Tumbuhan						
					Hortikultura, dan	(OPT)						
					Perkebunan	Tanaman						
						Pangan,						
						Hortikultura,						
						dan						
						Perkebunan						
						yang						
						Dikendalikan						
3	2	0	01	0	Penanganan	Jumlah Area	kecamatan	1200 ha	0	APBD	1324 ha	
	7	7		2	Dampak	Terdampak						39.000.00
					Perubahan Iklim	Perubahan						0
					(DPI) Tanaman	Iklim (DPI)						
					Pangan,	Tanaman						
						Pangan,						

					Hortikultura, dan	Hortikultura,						
					Perkebunan	dan						
						Perkebunan						
						yang						
						Ditangani						
3	2	0	01	0	Penanggulangan	Jumlah	kecamatan	4 kali		APBD	4 kali	
	7	7		5	pasca bencana	Penanggulang			23.940.000			23.940.00
					alam bidang	an Pasca						0
					Tanaman Pangan,	Bencana Alam						
					Hortikultura,	Bidang						
					Perkebunan dan	Tanaman						
					Kesehatan hewan	Pangan,						
						Hortikultura,						
						Perkebunan,						
						Peternakan						
						dan Kesehatan						
						Hewan						

3	2	0			Program	Presentase						
	7	7			Penyuluhan	peningkatan			2.616.700.			3.834.132.
					Pertanian	kapasitas			000			929
						kelembagaan						
						penyuluh						
3	2	0	1		Pelaksanaan	Persentase						
	7	7			Penyuluhan	pelaksanaan			2.616.700.			
					Pertanian	penyuluhan			000			
						pertanian						
3	2	0	01	0	Peningkatan	Jumlah	kabupaten	50		APBD	50	
	7	7		1	Kapasitas	Kelembagaan		orang	375.000.00		orang	36.554.10
					Kelembagaan	Penyuluhan			0			0
					Penyuluhan	Pertanian di						
					Pertanian di	Kecamatan						
					Kecamatan dan	dan Desa						
					Desa	yang						
						Ditingkatkan						
						Kapasitasnya						

## Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah – Rencana Ker**j**a

3	2	0	01	0	Peningkatan	Jumlah	Kecamatan	200		APBD	200	
	7	7		2	Kapasitas	Kelembagaan		kelomp	585.000.00		kelomp	960.346.7
					Kelembagaan	Petani di		ok	0		ok	50
					Penyuluhan	Kecamatan						
					Petani di	dan Desa yang						
					Kecamatan dan	Ditingkatkan						
					Desa	Kapasitasnya						
3	2	0	01	0	Penyediaan	Jumlah	Kecamatan	28		DAK,	28	
	7	7		3	Pemanfaatan	Sarana dan		Kecama	1.200.000.	APBN	Kecama	240.548.0
					Sarana dan	Prasarana		tan	000		tan	00
					Prasarana	Penyuluhan						
					Penyuluhan	Pertanian						
					Pertanian							
3	2	0	01	0	Pembentukan	Jumlah Badan	-	-		-	-	
	7	7		4	Badan Usaha	Usaha Milik			-			-
					Milik Petani	Petani yang						
						Dibentuk						

3	2	0	01	0	Pembentukan	Jumlah	kecamatan	24 kali		LOAN,	24 kali	
	7	7		5	Penyelenggaraan	Sekolah			456.700.00	APBN		2.596.684.
					Sekolah Lapang	Lapang			0			079
					Kelompok Tani	Kelompok						
					tingkat Kabupaten	Tani yang						
						Terbentuk dan						
						Beroperasi						
3	2	0			Program				10.810.000			10.810.00
	7	1			Perencanaan,							0
					Penganggaran,							
					dan Evaluasi							
					Kinerja							
					Perangkat							
					Daerah							
3	2	0	01	0	Penyusunan	Jumlah	kabupaten	2	4.680.000	APBD	2	4.680.000
	7	1		1	Dokumen	Dokumen		dokume			dokume	
					Perencanaan	Perencanaan		n			n	
					Perangkat Daerah	Perangkat						
					berupa Dokumen							

						Daerah yang Disususn						
3	2	0	01	0	Koordinasi dan	Jumlah	kabupaten	1	4.030.000	APBD	1	4.030.000
	7	1		6	Penyusunan	laporan		dokume			dokume	
					laporan capaian	capaian		n			n	
					kinerja dan	kinerja dan						
					ikhtisar realisasi	ikhtisar						
					kinerja SKPD	realisasi						
						kinerja SKPD						
3	2	0	01	0	Evaluasi kinerja	Jumlah	kabupaten	12 kali	2.100.000	APBD	12 kali	2.100.000
	7	1		7	perangkat daerah	evaluasi						
						kinerja						
						perangkat						
						daerah						

Halaman 141

3	2	0			Program				28.740.152			20.331.55
	7	2			Administrasi				.689			8.931
					Keungan							
					Perangkat							
					Daerah							
3	2	0	02	0	Penyediaan Gaji	Tersedianya	kabupaten	12	25.184.976	APBD	12	17.157.10
	7	2		1	dan Tunjangan	gaji pegawai		bulan	.689		bulan	9.931
					ASN							
3	2	0	02	0	Penyediaan	Jumlah	kabupaten	3 jenis	3.550.976.	APBD	3 jenis	3.173.252.
	7	2		2	Administrasi	pelayanan jasa			000			000
					Pelaksanaan	administrasi						
					Tugas ASN	keuangan						
3	2	0	02	0	Koordinasi dan	Jumlah	kabupaten	6	4.200.000	APBD	6	1.197.000
	7	2		7	Penyusunan	laporan		dokume			dokume	
					Laporan	keuangan		n			n	
					Keuangan	triwulan/semes						
					Bulanan/Triwulan	teran SKPD						
					/Semesteran							
					SKPD							

3	2	0			Program				583.575.70			570.846.5
	7	6			Administrasi				0			00
					Umum							
					Perangkat							
					Daerah							
3	2	0	06	0	Penyediaan	Jumlah	kabupaten	3 jenis	3.600.000	APBD	3 jenis	2.297.400
	7	6		3	Peralatan Rumah	peralatan						
					Tangga	rumah tangga						
						yang						
						disediakan						
3	2	0	06	0	Penyediaan bahan	Jumlah jenis	kabupaten	2 jenis	171.040.70	APBD	2 jenis	171.040.7
	7	6		4	logistik kantor	bahan logistik			0			00
						kantor						
3	2	0	06	0	Penyediaan	Jumlah jenis	kabupaten	5 jenis	29.500.000	APBD	5 jenis	18.073.40
	7	6		5	Barang Cetak dan	barang cetak						0
					Penggandaan	dan						
						penggandaan						

## Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah – Rencana Ker**j**a

3	2	0	06	0	Penyediaan Bahan	Jumlah jenis	kabupaten	3 jenis	40.420.000	APBD	3 jenis	40.420.00
	7	6		6	Bacaan dan	bahan bacaan						0
					Peraturan	yang tersedia						
					Perundang-							
					Undangan							
3	2	0	06	0	Penyelenggaraan	jumlah	kabupaten	12 kali	339.015.00	APBD	12 kali	339.015.0
	7	6		9	Rapat koordinasi	penyelenggara			0			00
					dan konsultasi	an rapat						
					SKPD	koordinasi dan						
						konsultasi ke						
						luar daerah						
3	2	0			Program				405.000.00			285.000.0
	7	8			penyediaan jasa				0			00
					penunjang							
					urusan							
					pemerintah							
					daerah							

3	2	0	08	0	Penyediaan jasa	jumlah jasa	kabupaten	12	405.000.00	APBD	12	285.000.0
	7	8		2	komunikasi,	komunikasi		bulan	0		bulan	00
					sumber daya air	dan listrik						
					dan listrik	yang tersedia						
3	2	0			Program				189.630.00			155.960.0
	7	9			pemeliharaan				0			00
					milik daerah							
					penunjang							
					urusan							
					pemerintah							
					daerah							
3	2	0	09	0	Penyediaan jasa	jumlah	kabupaten	1 unit	41.670.000	APBD	1 unit	41.670.00
	7	9		1	pemeliharaan,	kendaraan						0
					biaya	dinas yang						
					pemeliharaan, dan	dipelihara						
					pajak kendaraan							
					perorangan dinas							
					atau kendaraan							
					dinas jabatan							

3	2	0	09	0	Penyediaan jasa	jumlah	kabupaten	2 unit	107.160.00	APBD	2 unit	73.490.00
	7	9		2	pemeliharaan,	kendaraan			0			0
					biaya pemelihaan,	dinas						
					pajak dan	operasional						
					perizinan	yang						
					kendaraan dinas	dipelihara						
					operasional atau							
					lapangan							
3	2	0	09	0	Pemeliharaan	jumlah	kabupaten	60 unit	40.800.000	APBD	60 unit	40.800.00
	7	9		6	peralatan dan	peralatan dan						0
					mesin lainnya	mesin kantor						
						yang						
						dipelihara						
TOTAL												
									43.588.595			37.314.23
									.153			8.882

### Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2022 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka ditetapkan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2022 yaitu

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 2. Pembangunan Infrastruktur
- 3. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
- 4. Reformasi Birokrasi
- 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya
- 6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Memperhatikan prioritas pembangunan yang terdapat pada RKPD tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memiliki fungsi wajib bukan pelayan dasar berada pada prioritas ke-3 yaitu Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mencakup 9 (sembilan) Program terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu), yaitu:

# 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten
  - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik

- c. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
- d. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

### 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- d. Pemantauan, Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- f. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten
  - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
  - c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok
     Lokal
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan
  - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun
  - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan
     Berbasis Sumber Daya Lokal
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun

### 3. Program Penanganan Rawan Pangan

### - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten
- Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten

### 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

### - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
- c. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten

### 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

# - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

### - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik

# - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
   Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Laokasi
- b. Pendampimgan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

### 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- b. Koordinasi dan Sinkronissai Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

### - Pembangunan Prasarana Pertanian

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha
   Tani
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

### 8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota a. Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

### 9. Program Penyuluhan Pertanian

### - Pelaksana Penyuluhan Pertanian

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

### Bab V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan salah satu perangkat yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Kerja 2024 ini memuat rencana program dan kegiatan selain sebagai bentuk komitmen tahunan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura juga merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dan titik tolak bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2025 yang akan datang.

Rencana Kerja 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kementerian Pertanian RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah serta berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan ini, tentu belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan yang berkembang serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Terutama berkenaan dengan keterbatasan anggaran sehingga diperlukan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2024 ini semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang sudah menjadi tekad seluruh komponen masyarakat.

### 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di Perangkat Daerah yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di perangkat daerah, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

### 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya.
- b. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

### 5.3 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023, rencana tindak lanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindak lanjut tersebut antara lain:

- a) Dalam rangka menjaga kesinambungan dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perlu diikuti dengan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- b) Membuka ruang terhadap peran serta stakeholder dalam proses perencanaan sehingga transparansi akan lebih terwujud;
- c) Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM ASN Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja ASN.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Gunung Sugih, 24 Januari 2023 KEPALA DINAS

<u>JUMALI, S.P., M. IP</u> NIP. 19650930 199403 1 006